

**GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT MENOLAK TAMBANG
ILEGAL DI KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLI-TOLI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Proposal
Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

ALDIANSYAH
NIM: 21.2.17.0019

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 6 Agustus 2025 M
12 Safar 1447 H

Penyusun


Aldiansyah

Nim. 21.2.17.0019

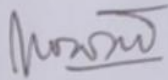
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Gerakan Perlawanan Masyarakat Menolak Tambang Ilegal Di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli" Oleh mahasiswa atas nama Aldiansyah NIM: 212170019, Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di seminarkan.

Palu, 6 Agustus 2025

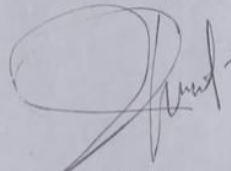
1447 H

Pembimbing I



Noorwahid Sofyan, M.A.
NIP. 198501062018011001

Pembimbing II

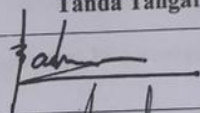
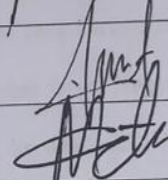
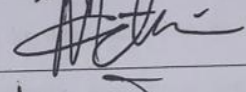
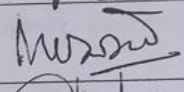
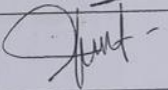


Sunardi, M.P.A.
NIP. 199110062020121004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Aldiansyah NIM. 21.2.17.0019 dengan judul "Gerakan Perlawanan Masyarakat Menolak Tambang Ilegal di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli", yang telah di ujikan di depan dewan penguji Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 26 September 2025 yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1447 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah yang dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial S.Sos Jurusan Pemikiran Politik Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

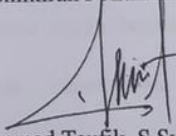
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fachrizza Ariyadi, S.I.Kom., M.Si.	
Penguji I	Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.	
Penguji II	Muthia, M.Ap	
Pembimbing I	Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A	
Pembimbing II	Sunardi, S.IP., MPA	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Adab


Dr. H. Sidik M. Ag
NIP. 196406161997031002

Ketua Jurusan
Pemikiran Politik Islam


Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos
NIP. 198604222019031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bissmillahirrahmaanirrahim

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil‘alamin dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Gerakan Perlawanan Masyarakat Menolak Tambang Ilegal Di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli”**, sebagai bagian dari tugas yang harus ditunaikan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Universitas Islam Neger (UIN) Datokarama Palu. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada nabi besar kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang insyaAllah akan selalu setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk orang tua tercinta yaitu Ayahanda (**Alm. Sadide**) beliau adalah sosok yang paling saya rindukan sampai saat ini dan Mama tercinta (**Murni**) yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan semua dukungan, semangat dan senantiasa selalu berdoa dengan sabar dan ikhlas mengiringi setiap langkah demi keberhasilan penulis. Terimakasih karena selalu memberikan semangat dengan selalu berpesan kepada penulis, bahwa orang-orang diluar sana sering mengatakan bahwa penulis tidak bisa dan tidak mampu menyelesaikan studi dikarenakan tidak didampingi dalam proses oleh sosok ayah. Dan skarang penulis bisa membuktikan bahwa anak yang tidak didampingi oleh sosok ayah inipun berhak memiliki gelar dibelakang

namanya. Kemudian Kepada saudara-saudaraku (**Sarni, Sarti, Suardi dan Muhammad**) yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Noorwahid Sofyan, M.A.** Selaku Dosen pembimbing utama dan Bapak **Sunardi, M.PA.** Selaku Dosen pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sekalipun telah tercurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sebagai akhir kata terpendam suatu harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini saya selaku penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag** Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta jajarannya Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
2. **Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta jajarannya Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. **Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.** dan **Bapak Fachriza Ariyadi, M.Si** Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI)
4. **Bapak Noorwahid Sofyan, M.A.,** dan **Bapak Sunardi, M.PA.** Selaku dosen Pembimbing Akademik penulis dalam perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan bantuan ilmu, kerja sama, dan melayani penulis dengan baik selama studi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Adab.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pelajaran berharganya dan telah banyak memberikan informasi selama menempuh Pendidikan
7. Teman-Teman **Kuliah Kerja Nyata (KKN)** Kelurahan Ujuna Palu Barat, Kebersamaan selama di lokasi KKN menjadi kenangan termanis yang tak pernah terlupakan
8. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada seorang wanita yang Bernama **Mona Calista S.E,** yang selalu menemani dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga sampai di titik ini. Yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam proses penyusunan skripsi ini. Seorang wanita yang bisa menjadi rumah dan tempat berkeluh kesah.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang berlipat ganda atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis memohon maaf terhadap semua pihak jika terdapat kesalahan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iError! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah	8
F. Garis-garis Besar Isi.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori dan Konsep	21
a) Gerakan Sosial	21
b) Masyarakat.....	24
c) Konsep Perlawanan Masyarakat	27
d) Konsep Tambang.....	34
e) Konsep Kebijakan Pemerintah	38
C. Kerangka Pemikiran.....	444

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Kehadiran Peneliti	49
D. Data dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	544
A. Pengecekan Keabsahan Data.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli	60
a) Sejarah Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli	60
b) Letak Geografis dan Sosial Masyarakat Kabupaten Tolitoli.....	61
B. Pertambangan Pasir dan Batu di Desa Malulu Kabupaten Tolitoli.....	64
a) Gerakan Perlawanan Masyarakat Menolak Tambang Ilegal Di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli	Error! Bookmark not defined.
C. Hasil Dan Pembahasan Bentuk Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang di Desa Malulu Kecamatan Dondo	69
a) Perlawanan Tidak Terorganisir	6969
b) Alasan Masyarakat Dondo Menolak Pertambangan di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.....	7575

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	8080
B. Saran.....	8282

DAFTAR PUSTAKA..... 844

LAMPIRAN 911

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Penelitian Terdahulu	28
TABEL 2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	73
TABEL 3 : Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin kabupaten tolitoli	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Kerangka Pemikiran.....	56
GAMBAR 2 : Peta Kabupaten Tolitoli.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
3. Kartu Seminar Proposal Skripsi
4. Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
5. Pedoman Wawancara
6. Daftar Informan
7. Surat Keterangan Izin Penelitian
8. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
9. Dokumentasi Hasil Penelitian
10. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Aldiansyah
Nim : 212170019
Judul Skripsi : GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT MENOLAK
TAMBANG ILEGAL DI KECAMATAN DONDO KABUPATEN
TOLI-TOLI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perlawanan masyarakat terhadap tambang ilegal di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kabupaten Tolitoli. Waktu penelitian yaitu dari bulan Juli 2025 sampai bulan Agustus 2025. Metode penelitian dengan wawancara langsung serta arsip/dokumen terkait perlawanan masyarakat terhadap tambang ilegal (CV. Rajawali). Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang melatarbelakangi Gerakan Masyarakat menolak tambang serta dampak-dampak yang terjadi akibat adanya pertambangan ilegal di Desa Malulu Kecamatan.

Hasil penelitian ini telah menjelaskan bahwa gerakan perlawanan masyarakat terhadap tambang di Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli merupakan wujud dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang abai terhadap prinsip partisipatif dan keberlanjutan lingkungan. Perlawanan ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bentuk kesadaran gerakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak ekologis dan ekonomis mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan sosial atau gerakan massa, adalah salah satu fenomena penting dalam sejarah perkembangan suatu negara baik negara maju, negara berkembang, maupun negara yang sedang berkembang. Sebagian besar kejadian atau peristiwa yang mengubah suatu negara, dari segi politik, segi ekonomi, ataupun segi sosial budaya. Yang seringkali berawal dari sebuah gerakan yakni gerakan sosial atau gerakan masyarakat . Seiring dengan berkembangnya suatu negara penyebaran isu-isu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, baik isu nasional maupun isu-isu internasional. Gerakan sosial bukan hanya terpaku pada masalah politik, ekonomi, maupun sosial-budaya saja, melainkan menyebar pada permasalahan-permasalahan tentang lingkungan hidup atau permasalahan-permasalahan lainnya.

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam salah satunya adalah pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan barang tambang dan keuntungan dari hasil tambang tersebut. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa pertambangan dilakukan di Indonesia atas persetujuan pemerintah dan masyarakat sehingga mendapatkan izin usaha yang jelas. Pertambangan adalah usaha yang legal sejauh dilandasi oleh peraturan perundang-undangan.

Hampir seetiap daerah atau Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat kekayaan akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Semua sumber daya alam dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut sudah terkandung dalam

pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) menyebutkan Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.¹

Bahan galian diatur dalam pasal 3 undang undang Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan Galian dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: (Bahan galian strategis) ; (2) Bahan galian vital; (3) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital. Sumber daya alam adalah salah satu bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan ekologi. Artinya pertambangan yang dilakukan tidak hanya menomorsatukan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diiringi dengan pengelolaan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam pada pertambangan secara berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian lingkungan.²

Eksploitasi sumber daya alam pada pertambangan secara berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Kegiatan eksploitasi dan galian sumber daya alam banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

Dikutip dari Jatam Sulteng (2018), aktivitas pertambangan pasir, batu dan krikil di desa malulu kecamatan dondo kembali beroperasi setelah beberapa minggu berhenti. Aktivitas pertambangan ini diduga ilegal karena tidak

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

² Herman Hidayat. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* ". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm 9

mengantongi izin dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (DESDM).

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi didalam suatu wilayah, diberikan mandat oleh rakyatnya guna mengatur dan memimpin kehidupan rakyatnya dalam suatu wilayah. Negara bertugas untuk dapat menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. oleh karena itu semua tanggung jawab pengurusan dan pengelolaan yang ada dalam suatu wilayah diserahkan kepada negara termasuk mengatur, dan mengkoordinir penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber daya/ kakayaan alam yang ada pada wilayahnya.³

Berdasarkan sumber informasi sebagian masyarakat dikeluhkan oleh matinya aliran air yang disebabkan karena banjir menghantam imtek (bak penyalur utama) yang menyebabkan kerusakan bak dan beberapa pipa besar. Menurut warga setempat, mengatakan bahwa desa malulu kecamatan dondo kabupaten toli-toli belum pernah terjadi banjir selama puluhan tahun yang dapat merusak bak air serta fasilitas pendukungnya, nanti setelah beberapa bulan perusahaan melakukan kegiatan pertambangan lalu terjadi banjir yang merusak itu.⁴

Dampak lainnya dari aktivitas pertambangan adalah matinya pasokan air untuk pertanian. Selain karena banjir terjadi lebih besar dari sebelumnya, juga

³ Agus Winasis. 2016. *Jurnal : Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan SDA*. Universitas Tunggaladewi.

⁴ Moh. Taufik, 2018. *Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah*.

karena pasir telah menutup irigasi. Jalur air untuk kepersawahan terputus, sehingga di beberapa tempat kegiatan persawahan terhenti.⁵

Berdasarkan hasil temuan ini dan dampak buruk aktivitas pertambangan pasir yang diberikan, masyarakat memita agar aparat penegak hukum khususnya polres Toli-toli mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang saat ini masih beroperasi. Meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk tidak menerbitkan IUP Batuan kepada perusahaan apapun di desa malulu kecamatan dondo, karena ini akan melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toli-toli Tahun 2012-2031. Yang disebutkan dalam pasal 30 ayat (3) bahwa kawasan peruntukan pertambangan Mineral non Logam dan Batuan hanya ada di kecamatan Galang, kecamatan Dakopamean dan kecamatan Baolan.⁶

Pada analisis dampak perekonomian masyarakat Desa Malulu mayoritas pertaniannya hampir 80% persen masyarakat pesawah dan pekebun sehingga pendapatan masyarakat Desa Malulu biasanya diperoleh dari hasil sawah dan kebun. Tetapi tidak ada kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya berfokus pada keadaan akan kebutuhan yang mereka peroleh dari hasil pertanian. Misalnya ada kerusakan dari persawahan dan juga ada dampak lingkungan yang berakibatkan pada polusi udara tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada masyarakat. Sehingga kebijakan dari pemerintah setempat dalam hal ini

⁵ Ibid

⁶ Ibid. Halaman 3

pemerintah desa melakukan terobosan baru kepada masyarakat untuk tidak menanam padi pada musim hujan di alihkan menanam jagung dan juga kacang-kacangan pada areal persawahan tersebut.

Berbicara mengenai fungsi pengawasan dan fungsi kontrol dalam hal ini proses pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan perbanguan yang diemban oleh pemerintah pada setempat pada sektor pertambangan yang terjadi di kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli, pemerintah setempat membiarkan para pemilik usaha tambang tersebut terus beroperasi dalam melakukan eksploitasi pertambangan batu dan pasir secara besar-besaran sehingga tidak memperhatikan sebab dan akibat dari eksploitasi dari pertambangan tersebut dan pihak yang dirugikan adalah masyarakat. Maka itu masyarakat melakukan aksi gerakan penolakan untuk menuntut beberapa perusahaan tersebut agar menutup lokasi pertambangan.

Dikutip dari artikel Jaringan Advokasi Tambang oleh Moh Taufik (2018). Aktivitas pertambangan pasir, batu dan kerikil CV. Rajawali Desa Malulu kecamatan Dondo kabupaten Toli-toli tidak memiliki izin. Keberadaan CV. Rajawali di Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli menuai protes masyarakat sekitar, masyarakat takut jika kelak aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi sejak tahun 2017 ini akan berdampak pada terganggunya stabilitas alam setempat, apalagi aktivitas tambang pasir, batu dan krikil sangat berdekatan langsung dengan areal irigasi yang digunakan masyarakat desa Malulu untuk mengairi areal persawahan.⁷

⁷ Ibid. Halaman 4

Berdasarkan hasil investigasi JATAM SULTENG di lapangan, telah ditemukan aktivitas eksploitasi yang dilakukan CV. Rajawali, dengan diangkutnya keluar beberapa mineral menggunakan dump truck di areal pertambangan tersebut, aktivitas eksploitasi ini sangat bertentangan dengan surat yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat Nomor:540/5032-Minerba/DESDM, perihal Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bantuan s/d Maret 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2018, setelah JATAM mengirimkan surat permintaan Daftar IUP bantuan yang aktif, baik yang dalam tahapan Eksplorasi maupun yang tahapan Eksploitasi.

Aktivitas pertambangan pasir, batu dan krikil CV. Rajawali di Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli ilegal, yang menyebabkan tiga hal, pertama terjadinya pelanggaran hukum, berupa aktivitas eksploitasi yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua jika aktivitas tambang ini ilegal tentu tidak melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bisa dipastikan akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar. Ketiga aktivitas pertambangan mengancam areal irigasi yang digunakan warga desa Malulu untuk mengairi areal persawahan, sehingga jika aktivitas pertambangan ilegal ini terus dilanjutkan maka masyarakat Desa Malulu akan kehilangan areal persawahan mereka, yang menggantungkan kebutuhan air di irigasi tersebut.⁸

Maka untuk melihat kebijakan pemerintah Kabupaten Toli-toli terhadap permasalahan penolakan masyarakat terhadap tambang tersebut penulis tertarik

⁸ Ibid.

untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut dengan mengangkat judul “**Analisis Gerakan Politik Masyarakat Dalam Penolakan Eksploitasi Tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dipaparkan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Kenapa masyarakat Dondo menolak eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli ?
2. Bagaimana bentuk bentuk perlawanan masyarakat terhadap perusahaan tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Dondo menolak eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terkait dengan analisis gerakan politik dalam penolakan eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli, Yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang

akan datang mengenai penolakan masyarakat terhadap eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

2. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang menyangkut analisis gerakan politik masyarakat dalam penolakan eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi saling mendukung serta melihat apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap perusahaan tambang serta suatu informasi bagi pemerintah, perusahaan tambang dan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Adapun bagian-bagian yang akan penelitian jelaskan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat

Irwansyah (2020), Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "*society*" yang berarti "masyarakat", lalu kata *society* berasal dari bahasa Latin yaitu "*societas*" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu "*musyarak*". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian

Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. ⁹

2. Gerakan Masyarakat

Gerakan dalam bahasa Inggris *movement*, dan dalam bahasa Arab *alharakah* atau *al-nahdhah*. Baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau pun bahasa Arab, ketiganya dalam padanan makna yang sama. Gerakan berasal dari kata gerak dan berakhiran an menjadi gerakan yang berarti bangun dari keadaan yang diam atau stagnan, seperti seseorang bangun dari tempat tidur atau dari tempat duduk, kemudian berjalan menuju ke tempat yang dituju menjadikan dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karenanya, pergerakan berarti perihail atau keadaan bergerak, atau kebangkitan melakukan perjuangan untuk mencapai perbaikan, seperti pergerakan nasional yang muncul di mana-mana di seluruh wilayah tanah air Indonesia di masa lalu dalam rangkan merebut kembali kemerdekaan dari penjajah asing. (Sirojuddin, 2018)¹⁰

⁹ Irwansyah. *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*. Universitas Indonesia, 2020. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1.

¹⁰ Dr. Sirojuddin Aly, MA and Dr. Haniah Hanafie, M.si. *Gerakan Politik Islam Indonesia*. Universitas Islam Negeri Jakarta 2018.

Menurut Soekanto Soerdjono (2009) Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Pengertian Masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.¹¹

3. Eksploitasi

Pengertian Eksploitasi sendiri tercantum pada Pasal 1 angka 9 UU No 22 Tahun 2001 mengenai minyak serta gas bumi ialah deretan aktivitas yang tujuannya guna menciptakan minyak serta gas bumi dari daerah kerja yang ditetapkan, yang meliputi pengeboran serta penanganan sumur, membangun sarana pengangkut, menyimpan serta mengolah guna memisahkan serta memurnikan minyak maupun gas bumi di lapangan beserta aktivitas lainnya yang membantu. Pengertian eksploitasi ini mempunyai kemiripan dengan pengertian operasi produksi dalam UU Minerba, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UU Minerba Operasi produksi ialah deretan aktivitas bisnis tambang yang mencakup pengembangan, menambang, penanganan serta purifikasi maupun mengembangkan maupun memanfaatkan yang mencakup pengiriman serta

¹¹ Soekanto Soerdjono. 2009, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

penjualan , beserta cara mengendalikan imbas ekologis selaras pada hasil kajian kemungkinan.¹²

Kegiatan eksploitasi pertambangan tanpa izin juga merugikan negara dan masyarakat sebab seharusnya kekayaan alam Indonesia yang dimiliki oleh negara mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya. (Herman, 2022)Dilihat dari satu sudut pandang, ada beberapa sudut pandang yang diabaikan dalam mencari keuntungan finansial di kawasan pertambangan, termasuk kerugian lingkungan hiup akibat pertambangan tanpa izin yang semakin banyak menghabiskan aset-aset biasa yang dibatasi. (Tamara, 2011)¹³

4. Pertambangan

Pertambangan menurut UU Minerba mencirikannya dalam berbagai atau semua tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan, pengelolaan yang meliputi pemeriksaan umum, penyelidikan, kajian ketercapaian, pengembangan, penambangan, penanganan serta purifikasi, pengantaran serta kesepakatan, beserta aktivitas setelah penambangan. Definisi ini menjelaskan bahwasanya Tindakan tambang merupakan sebuah Tindakan besar yang tentunya juga mampu memberi utilitas yang sangat tinggi untuk pengelolanya. (Gocha Narcky Ranggalawe, 2023).¹⁴

Pertambangan adalah sejenis tindakan pengelolaan mineral dan bahan pertambang lainnya yang berasal dari dalam bumi. Bahan mineral disebut juga

¹² Herman Hidayat. 2011. *Politik LIngkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* ". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm 9

¹³ Tamara Sujarwo Putri. *Tinjauan Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12000-12007

¹⁴ Gocha Narcky Ranggalawe. 2023. *Settlement of law Enforcement Dilemma Mining Without License*. Universitas Sang Bumi Ruwa Lampung, Halaman 25

sumber daya alam yang tak terbarui, artinya setelah mineral digali, mineral tersebut tidak dapat dipulihkan atau kembali ke kondisi aslinya. Pertambangan ini melibatkan pengambilan material yang dapat diambil dari bumi.¹⁵

Usaha pertambangan merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan penggunaan hasil bahan tambang yang berada pada bumi. Usaha tersebut dapat dirumuskan dalam berbagai kegiatan seperti Pemeriksaan umum usaha pertambangan adalah pemeriksaan geografis atau geofisika secara menyeluruh, baik dari darat, perairan, maupun dari udara yang bertujuan untuk memberikan peta daratan secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk menentukan indikasi keberadaan bahan hasil galian. (M. T. Toha, 2019; Muhammad Agus Fajar Syaefudin, 2020)¹⁶

Dalam banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang dijelaskan diatas dapat juga mengakibatkan munculnya berbagai kejahatan dalam bidang pertambangan. Kejahatan yang pertama yakni kegiatan suatu bisnis pertambangan tidak disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang kedua, penyampaian laporan yang palsu ataupun distorsi ataupun data palsu. Dari berbagai banyaknya kejahatan dalam pertambangan yang sering terjadi yakni kegiatan usaha yang

¹⁵ Ibid. Halaman 26

¹⁶ M. T. Toha, 2019. *Simulasi BERM Terhadap Kestabilan Lereng Final Tambang Batubara Metode PSEUDO-STATIK*. Jurnal Pertambangan, 3(4)

tidak disertai izin melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. (Hesti Endrawati, 2023)¹⁷

5. Pro dan Kontra Pertambangan

Ira andriani (2020). Teori pro dan kontra pertambangan melibatkan berbagai pandangan tentang manfaat dan dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Secara pro, pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan bahan mentah untuk berbagai industri, termasuk energi terbarukan. Namun, secara kontra, pertambangan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air, penggundulan hutan, dan gangguan ekosistem, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.¹⁸

1) Argumentasi Pro

a) Ciptaan lapangan kerja

Pertambangan seringkali menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b) Peningkatan ekonomi

Pemasukan dari pertambangan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, dan kesehatan serta meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.

¹⁷ Hesti Endrawati, 2023. *Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C* (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). *Restorica*, 9(1), 37–43

¹⁸ Eka Zuni Lusi Astuti, 2012. *Pro Dan Kontra Rencana Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Gajah Mada

c) Penyediaan bahan mentah

Pertambangan menyediakan bahan mentah yang penting untuk berbagai industri, termasuk energi terbarukan, konstruksi dan manufaktur.

d) Pengembangan teknologi

Pertambangan mendorong pengembangan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

2) Argumentasi Kontra

a) Kerusakan lingkungan

Pertambangan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, penggundulan hutan, dan gangguan ekosistem dan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan.

b) Kesehatan manusia

Paparan zat kimia dan debu tambang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan dan kanker.

c) Konflik sosial

Pertambangan dapat memicu konflik sosial antara masyarakat lokal, perusahaan tambang dan pemerintah.

d) Kerugian ekonomi

Pengelolaan pertambangan yang buruk dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan perusahaan tambang.

e) Ketidakadilan

Pertambahan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan lingkungan, dimana manfaatnya tidak merata dan beban kerugiannya ditanggung oleh masyarakat yang paling rentan.¹⁹

F. Garis-garis Besar Isi

Secara garis besar, skripsi ini tersusun dalam sistematika pembahasan terdiri tiga bab dan pada setiap bab terdiri sub-sub pembahasan. Adapun garis-garis besar skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama memuat pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab Kedua merupakan bagian dari kajian pustaka yang didalamnya penulis mencantumkan telaah hasil penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab Ketiga memuat metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat menyajikan data penelitian serta analisisnya yang terdiri dari Gambaran umum Lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan temuan penelitian.

¹⁹ Ibid. Halaman 66

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari Kesimpulan atau jawaban singkat dan padat terhadap rumusan masalah, dan saran yang merupakan masukan untuk peneliti lain, praktisi maupun pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui gerakan perlawanan masyarakat dalam penolakan eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data-data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah didapat kemudian di analisis dengan teknik deskriptif.

Untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian yang sama, perlu adanya orisinalitas penelitian yang menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terdapat tiga penelitian sebelumnya dengan kajian yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya:

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Bentuk-bentuk Perlawanan
1 .	Irene Katharina Tilis (2023) ¹	Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten	1. Metode yang di gunakan, pendekatan Deskriptif Kualitatif. 2. Sama-sama fokus pada gerakan masyarakat dalam menolak eksploitasi	1. Lokasi Penelitian 2. Berfokus pada penolakan eksploitasi SDA hingga ditemukan adanya suatu lembaga yang terstruktur di Desa Naiola yang	1. Melakukan aksi penolakan secara langsung di area eksploitasi dan kepada para pengusaha tambang agar berhenti melakukan eksploitasi SDA di desa Naiola.

¹ Irene Katharin Tilis, Fidelis A, et all, *Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengan Utara*, Universitas Timor

		Timor Tengah Utara	tambang.	mempunyai kepemimpinan yang jelas agar dapat mengarahkan masyarakat Desa Naiola dalam melakukan setiap aksi penolakan sehingga keluhan-keluhan yang dirasakan dan di sampaikan oleh masyarakat setempat dapat didengar dan di tindaklanjuti oleh pemerintah setempat. 3. Adanya eksploitasi SDA yang dilakukan perusahaan tambang yang begitu lama sejak tahun 2014 sapai saat ini sehingga masyarakat merasa dirugikan	
--	--	-----------------------	----------	---	--

				dengan rusaknya area persawahan sebanyak 107,56 HA.	
2.	Riskiyanto Bahrul Ulum (2022) ²	Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Negemoni Negara (Studi kasus Gerakan Menolak Tambang <i>Quarry</i> Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworjo	1. Metode yang di gunakan, pendekatan Deskriptif Kualitatif. 2. Sama- sama fokus Pada penolakan masyarakat terhadap eksploitasi tambang	1. Lokasi Penelitian 2. Berfokus pada penolakan tambang <i>Quarry</i> desa wadas, hingga ditemukannya hasil tindakan/aksi kolektif dengan membentuk gempadewa, wadon wadas, dan kamudewa untuk wadah perjuangan. Selain itu juga melekukan aksi kolekti konflikktual dan non konflikktual.	1. Membentuk kelompok independen, wadas, yang memiliki sekitar 300 anggota. 2. Berjaga di pintu masuk desa, berkolaborasi dengan Gempadewa, dan melibatkan para wanita dalam aksi protes yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

² Riskiyanto Bahrul Ulum, 2022. *Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Hegemoni Negara (Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang Quarry Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kecamatan Purworejo*. Universitas Negeri Yogyakarta

3.	Ridwan L (2017) ³	Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)	1. Metode yang di gunakan, pendekatan Deskriptif Kualitatif. 2. Sama-sama fokus pada penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang	1. Lokasi Penelitian 2. Berfokus pada penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang hingga memperoleh hasil adanya perlawanan secara kelompok sosial atau kolektif dalam hal demonstrasi.	1. Bersurat diberbagai instansi pemerintahan yang terkait untuk melakukan aksi penolakan di wilayah pertambangan. 2. Melakukan aksi penolakan secara langsung di area eksploitasi dan kepada para pengusaha tambang agar berhenti melakukan eksploitasi SDA.
4.	Yulisa Fringka (2016) ⁴	Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Data, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi	1. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Sama-sama fokus kepada penolakan masyarakat terhadap perusahaan	1. Lokasi Penelitian 2. Berfokus pada perunahan transisi politik dari kolonial-Orde baru reformasi dan dampaknya dalam memperluas dan meningkatkan pengetahuan	1. Jalur diplomasi, rapat adat dan musyawarah, surat, penggalangan tanda tangan dan pemasangan benner. 2. pemblokiran dan pengusiran guna untuk mengklarifikasi serta utnuk melakukan

³ Ridwan L, 2017. *Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)*. Universitas Muhammadiyah Makassar

⁴ Yulisa Fringka, 2016. *Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi*, Universitas Indonesia

			tambang	masyarakat akan tambang khususnya	negosiasi dan konsensus dengan pemerintah daerah.
5.	Syifa Izdiyar Firdausa Asfianur (2020) ⁵	Gerakan Sosial “Sangsanga Melawan” (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan Dari Eksploitasi Tambang di Kelurahan Sangsanga Dalam Kecamatan Sangsanga Kabupaten Kutai Kartanegara)	1. Metode yang digunakan sama yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. 2. Sama-sama fokus kepada penolakan masyarakat terhadap eksploitasi tambang	1. Lokasi Penelitian 2. Berfokus pada penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang hingga memperoleh hasil adanya perlawanan secara kelompok sosial atau kolektif dalam hal demonstrasi.	1. Demonstrasi kepada pihak Pemerintah CV. Sangsanga Perkasa dalam bentuk penolakan IUP yang diterbitkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2. “Melawan dengan menanam 3. “Melawan” dengan membangun (membangun sebuah fasilitas-fasilitas pendukung agar masyarakat bisa melakukan pertemuan dengan nyaman). 3. Kampanye

⁵ Syifa Izdiyar Firdausa Asfianur, et all, 2020, *Gerakan Sosial “Sangsanga Melawan” (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan Dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sangsanga Dalam Sangsanga Kabupaten Kutai Kertanegara)*, Journal Pemerintahan Intergratif.

					perlawanan melalui media sosial, surat kabar, dan spanduk-spanduk.
--	--	--	--	--	--

Sumber: Irene Katharina Tilis 2023, Riskiyanto Bahrul Ulum 2022, dan Ridwan L

2017

B. Kajian Teori dan Konsep

a) Gerakan Sosial

Gerakan dalam bahasa inggris *movement*, dan dalam bahasa arab *al-harakah* atau *al-nahdhah*. Baik dalam bahasa indonesia, bahasa inggris atau pun bahasa arab, ketiganya dalam padanan makna yang sama. Gerakan berasal dari kata *gerak* dan berakhiran *an* menjadi *gerakan* yang berarti bangun dari keadaan yang diam atau stagnan, seperti seseorang bangun dari tempat tidur atau dari tempat duduk, kemudian berjalan menuju ketempat yang ditujuh menjadikan dia bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Oleh karenanya, pergerakan bererti perihai atau keadaan bergerak, atau kebangkitan melakukan perjuangan untuk mencapai perbaikan, seperti pergerakan nasional yang muncul di mana-mana di suluruh wilayah tanahair Indonesia dimasa lalu dalam rangka merebut kembali kemerdekaan dari penjajah asing.⁶

Dalam referensi sosiologis dikenal adanya berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para sosiolog yang terkait dengan pengertian tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial. Cohen misalnya (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial yaitu

⁶ Ibid. Halaman 34

gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan sesuatu unsur tertentu dalam masyarakat yang luas. Lalu, lebih jauh Cohen mengemukakan tentang adanya beberapa ciri suatu gerakan sosial yang diantaranya : adanya tujuan yang ingin dicapai (sasaran), terencana serta terdapat suatu ideologi.⁷

Sementara itu Zurcher dan Snow dalam buku Michener dan Delamater (1999) merumuskan definisi gerakan sosial sebagai kegiatan yang sifatnya kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu. Selanjutnya, Touch dalam kuppuswamy (1979) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gerakan sosial yaitu suatu usaha sejumlah individu yang secara kolektif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu masyarakat. Adapun Blumer dan Allen (1980) menganggap gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan baru.⁸

Kemudian, Gusfield dan Allen (1980) menganggap apabila suatu gerakan sosial sebagai kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi sosial. Dari berbagai definisi tentang gerakan sosial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan gerakan sosial yaitu suatu gerakan yang dilakukan sejumlah orang yang sifatnya terencana dan terorganisir dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan misi gerakan itu. Disamping

⁷ Cohe. J Bruce. 1983. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta : PT Bina Aksara.

⁸ Kuppuswamy, B. 1979. Elements of Social Psychology. New Delhi : Vikas Publishing Hous PVT Ltd.

itu, jika dilihat dari cirinya maka sebuah gerakan sosial memiliki beberapa ciri tersendiri.⁹

Kita sebut saja umpamanya pendapat yang dikemukakan oleh David Aberle yang mana dia menggunakan kriteria perubahan yang dikehendaki baik itu pada tingkat individu maupun pada level masyarakat serta besarnya perubahan yang diinginkan. Lalu, Locer 2002 menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial setidaknya memiliki tiga ciri khas antara lain : pertama, terorganisir. Dalam hal ini, perilaku yang ditampilkan para pendukung gerakan sosial berpedoman pada cara tertentu yang diorganisir oleh seorang pemimpin itu melalui adanya tugas yang dilimpahkan pada anggotanya. Kedua, membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Maksudnya sebuah gerakan sosial dapat bertahan dalam rentang waktu yang relatif lama sesuai dengan tujuan gerakan sosial itu.¹⁰

. Penting untuk diketahui kalau suatu gerakan sosial dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama karena gerakan itu dibentuk tidak bersifat spontanitas melainkan melalui proses yang cukup panjang, terencana, terorganisir dan mempunyai aturan baik yang sifatnya tertulis maupun tidak yang patut diikuti oleh anggota organisasi tersebut. Terlebih lagi, dengan semakin rumitnya kepentingan publik yang harus diakomodasi maka konsekuensinya kemudian mereka yang terlibat dalam gerakan sosial tersebut harus mampu menyusun suatu konsep, rencana dan program yang bersifat sistematis serta terukur sehingga sasaran kegiatan yang menjadi agenda program gerakan sosial itu dapat tercapai.

⁹ Allen. D.E. 1980. Social Psychology as Social Process. Wadworth Inc : California

¹⁰ Locer. 2002. Collective Behavior. New Jersey : Pearson Education Inc. Upper Sadle River.

Yang keempat didukung dana yang cukup. Suatu gerakan sosial hanya dapat bekerja secara efisien dan efektif manakala didukung dana yang memadai untuk membiayai seluruh aktivitas yang telah dirancang sedemikian rupa dalam program kegiatan gerakan sosial itu.¹¹

b) Masyarakat

Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu maupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam suatu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Kata masyarakat sendiri pasti sudah sering kita dengar, seperti masyarakat perkotaan, masyarakat desa, masyarakat bugis, masyarakat jawa dan lain-lain. Seringkali diartikan secara mudah sebagai warga tetapi konsep masyarakat sendiri cukup rumit untuk dapat dimengerti. Berdasarkan ilmu *atymologi* yang mempelajari asal usul kata, istilah masyarakat ini merupakan istilah serapan dari bahasa Arab dan bersaal dari kata *musyarak* yang bearti ikut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut dengan *society*. Yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya. Oleh karena itu bisa digaris lurus bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam suatu wilayah.¹²

¹¹ Andi Haris,Asyraf Bin Hj. AB Rahman,Wan Ibrahim Wan Ahmad.2019. *Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial*.Hasanudin *Journal Of Sociology*. Makassar

¹² Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa." *Publiciana* 11.1 (2018): 72-88.

Menurut Karl Marx (2001), berpendapat bahwa pengertian masyarakat merupakan hubungan ekonomis dalam hal produksi atau konsumsi yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis seperti teknik dan karya. Mansyur fakih (Zubir 2022), berkata bahwa pengertian masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian acara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju.¹³

Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama. Masyarakat awalnya terbentuk dari sekumpulan orang saja. Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga lalu kemudian berangsur-angsur dari sekeluarga membentuk RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun. Dusun pun kemudian berkembang menjadi beberapa Kecamatan lalu menjadi Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya membentuk sebuah Negara. Masyarakat tidak akan pernah terbentuk tanpa kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengahnya. Seorang pemimpin yang akan mengepalai seluruh masyarakat dapat dipilih dengan berbagai cara misalnya lewat pemungutan suara seperti Pemilu atau dengan melihat dari garis keturunannya. Dalam suatu daerah yang masih kental akan

¹³ Maulidia, Hanifa. "Relasi agama dan masyarakat dalam perspektif Emile Durkheim dan Karl Marx." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 13.2 (2019): 183-200.

budaya leluhurnya, pemilihan pemimpin sudah terikat dengan aturan masing-masing yang disebut dengan adat istiadat.¹⁴

Objek kajian, sosiologi mengkaji tentang manusia dan aspek sosialnya yang sering disebut masyarakat, dan hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial (*social animal*) Sanderson (2010:43), yang perlu berinteraksi dan hidup bersama dalam menjalani kehidupan mereka, serta saling membutuhkan satu sama lainnya dalam mencapai tujuan, maka dari itu manusia harus berkelompok dan terorganisir yang sering disebut masyarakat. Warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2000:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah lakuserta kebiasaan-kebiasaan manusia.¹⁵

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2000:22). Masyarakat dalam interaksinya, menimbulkan produk-produk interaksi yang beranekaragam, seperti nilai-nilai sosial dan norma yang dianut dalam sebuah masyarakat tertentu secara individu maupun kelompok, termasuk juga pola hubungan dalam masyarakat, berdasarkan kesatuannya, masyarakat terbagi menjadi masyarakat desa dan masyarakat kota,

¹⁴ Simbolon, M. (2020). Pendidikan Dalam Masyarakat Modern Sederhana. *Ensiklopedia Education Review*, 2(1), 31-35.

¹⁵ Ibid. Halaman 88

oleh karena itu, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi satu sama lain yang terikat atas aturan dan norma tertentu yang bersifat kontinu dan sifatnya terikat.¹⁶

c) Konsep Perlawanan Masyarakat

Kekuasaan, sebagaimana yang di kemukakan Weber (2005). Merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasafrustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau *sosial movement*, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.¹⁷

Scott (2002), Mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karekteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public*

¹⁶ Soekanto Soerdjono. 2009, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta : PT Raja GRafindo Persada

¹⁷ Alhakim, B. A. (2023). Selayang Pandang Gerakan Politik & Perubahan Sosial (Kajian Sosiologis Perilaku Makna). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(4), 1191-1204.

transcript) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinator. Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, organik, sistematis dan kooperatif. *Kedua*, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri. *Ketiga*, berkonsekuensi revolusioner, dan/atau *Keempat*, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinator.¹⁸

Gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya

¹⁸ Nurdin, N. (2021). Tradisi perlawanan kultural masyarakat samin. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 71-86.

dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.¹⁹

Soekanto dan Susilo memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan. *Kedua*, adanya penggantian basis legitimasi, *Ketiga*, perubahan sosial yang terjadi bersifat *massif* dan *pervasive* sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, dan *Keempat*, koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru. Dan Smelser menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor. *Pertama*, daya dukung struktural (*structural condusiveness*) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). *Kedua*, adanya tekanan- tekanan struktural (*structural strain*) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan. *Ketiga*, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut. *Keempat*, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan

¹⁹ Khusniah, K. W. (2024). Gerakan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 447-455.

kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. *Kelima*, upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan.²⁰

Perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, *Kedua*, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, *Ketiga*, Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan; atau *Keempat*, Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini. Percobaan-percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi-negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem. Tetapi, menurut, semua itu hanya merupakan akibat-akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas-kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan-singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang-orang yang mengadakan perlawanan.²¹

²⁰ Syaribulan, S., & Akhir, M. (2015). Gerakan sosial masyarakat peduli lingkungan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2).

²¹ Puryanto, S., & Suyahmo, S. (2019). Strategi Gerakan Perlawanan Sosial Masyarakat Rembang dalam Menolak Korporasi Pabrik Semen. *Dialogia*, 17(2), 181-200.

Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga, dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya sehingganya dalam melakukan perlawanan sering terjadi indikasi adanya intimidasi dan refresifitas dari aparat Negara dan dari lawan politiknya.

Dikutip dari Scott (2002) menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyisembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana, melawan efekefek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencar dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana-sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan jaringan informasi yang padat dan sub kultursub kultur perlawanan yang kaya.²²

Perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, kaum miskin kota, petani, dan lain- lain) bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak- pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur idiologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu

²² Ibid. Halaman 25

gerakan yang radikal. Dalam percaturan politik, massa dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari berbagai kelompok yang bertikai. Ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam gelombang yang besar, gerakan ini memiliki kecenderungan melawan arus zaman, arus dari status *quo* yang berkuasa. Gerakan seperti ini biasanya dipelopori oleh mahasiswa sebagai aktor intelektual.²³

Empat faktor yang menentukan intensitas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan politis sebagai jalan keluar. Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam. Ketiga, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Dan keempat, kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok- kelompok dominan. Seperti yang diikuti oleh paper yang berjudul *“large dam victims and their defenders: the emergence of an anti- large dam movement in Indonesia”*, yang kemudian dikutip oleh Sangaji (2000), terdapat tiga karakteristik gerakan sosial, yakni: identifikasi, oposisi, dan totalitas. Identifikasi berkaitan dengan aktor- aktor gerakan yang dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu para korban (pemilik tanah) dan para pembelanya. Oposisi berhubungan dengan apa (siapa) yang hendak ditentang. Dan prinsip totalitas berhubungan dengan teori- teori yang mendasari gerakan tersebut. Berkaitan dengan cara- cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan, Sangaji (2000) membagi kedalam dua bentuk, yakni:

- a. perlawanan yang diungkapkan secara individual

²³ Patmah, N. (2021). Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang).

- b. perlawanan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kolektif atau bersama

Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam cara mulai dari aksi protes terbuka yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara- cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival. Perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, NGO, tokoh intelektual setempat (Sangaji 2000). Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu:

- a. Para pendukung spesialis merupakan individu dan organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan idiologi untuk menentang kebijakan tersebut.
- b. Para pendukung umum merupakan individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi.²⁴

Sangaji (2000) menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi sosiokultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan- alasan yang bersifat sosial, ekonomi, biasanya diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama bermukim di tempat tersebut.

²⁴ Riyono, S.(2022). *Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas*. Universitas 17 Agustus. Semarang

d) Konsep Tambang

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia. Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuanbatuan yang ada di bumi. Adapun jenis dan manfaat sumberdaya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu Negara.²⁵

Usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan bebatuan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara).²⁶

²⁵ Triana, S., & Antaryama, I. G. N. (2016). Konsep Defamiliarisasi pada Desain Museum Tambang Pasir Sungai Brantas. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2).

²⁶ Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara*. Justika Siar Publika.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non renewable*), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibanding perusahaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam resiko di bidang pertambangan, yaitu resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestic. Resiko-resiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya dan pajak usaha yang mempunyai resiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*rate of return*) yang lebih tinggi.²⁷

Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peraturan pelaksana dalam kegiatan pertambangan khususnya antara lain Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-

²⁷ Damayanti, A., Salsabila, A. P., & Pramasha, R. R. (2023). Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2), 195-210.

Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.²⁸

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah No. 26 tahun 2012 dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara (antara lain bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut). Pertambangan mineral digolongkan atas : Pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.²⁹

Dikutip dari Ahmad Syarifudin (2021). Penambangan pasir merupakan suatu cara atau proses kegiatan pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan pasir dengan cara menggali sungai maupun dataran yang memiliki kandungan pasir yang cukup tinggi. Aktivitas penambangan dianggap uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan masyarakat petani. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka dapat mengubah secara total baik iklim atau lapisan tanah.³⁰

²⁸ Setiyo Utomo, S. H., & Kn, M. Penguatan Pasal 33 Ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Majelis*, 51.

²⁹ Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506.

³⁰ Ahmad, S. (2022). *Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi*

Dampak lingkungan pertambangan berbeda antara jenis tambang yang satu dengan yang lain. Tambang yang ada berada jauh di bawah permukaan bumi seperti tambang minyak dan gas (migas) sehingga penambangannya dilakukan dengan membuat sumur. Oleh sebab itu, penambangannya relatif tidak membutuhkan daerah yang luas di permukaan. Tambang ada yang digali di permukaan atau tambang dengan membuat terowongan dekat permukaan seperti batu bara, tembaga, emas dan lain-lain sehingga relatif membutuhkan daerah yang luas di permukaannya dan sebagai akibat dampak lingkungan fisik maupun sosialnya lebih besar. Apalagi tambang tersebut tadinya merupakan mata pencaharian penduduk setempat.³¹

Pentingnya penerapan kegiatan industri dan/atau pembangunan yang berbasis lingkungan, perlu disadari oleh setiap elemen bangsa, karena persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama. Hanya saja dalam pratiknya, diperlukan lembaga formal pengendali yang secara yuridis berwenang untuk itu. Pengendalian kegiatan dan operasionalisasi industri, dalam prakteknya terwujud dalam konsep dan program kerja sistematis dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup harus bermuara pada terjaminnya kelestarian lingkungan, seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

Pada Industri Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

³¹ Manik, J. D. N. (2013). *Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. Promine*, 1(1).

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

e) Konsep Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara (Ridwan L 2017).³²

Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.³³

Sangat banyak pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan

³² LABAKA, T. Y., RARES, J., & KIYAI, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Buho-Boho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(112).

³³ Anggara, S. (2014). Kebijakan publik.

pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Dikutip dari Thomas R. Dye (1978:3) bahwa "*Public policy is whatever government chose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik.³⁴

Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai suatu konsep menjadi suatu yang aktual, sesuatu yang tidak sekedar menjadi pemikiran akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan menjadikan ia menjadi aktual dalam kehidupan pemerintahan suatu negara (Faried 2012:3).³⁵

Kebijakan sebagai suatu studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Didalam kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuatan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta

³⁴ Rochimasnaini, A. (2016). *Negara dan kebijakan publik (studi peran negara terhadap kebijakan investasi pembangunan infrastruktur kereta cepat dalam perspektif ekonomi politik)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

³⁵ Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*.

menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. (Faried 2012:7).³⁶

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat (Abidin, 2012 : 19). Menurut Eyestone dalam Winarno (2012 : 20) definisi kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012 : 20), definisi dari kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Thomas R. Dye dalam Nugroho (2011 :94), mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Sedangkan menurut David Easton dalam Nugroho (2011:93) , mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).³⁷

Selanjutnya tentang konsep kebijakan secara konseptual sering dikonsepsikan denganb terminologi kebijaksanaan sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan *wisdom* yang berarti cinta kebenaran. Konsep kebijaksanaan diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak, dalam bahas politik diistilahkan sebagai *statemen of intens* atau perumusan keinginan, Budiarto dalam

³⁶ AZLLA, E. Z. (2018). *Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA).

³⁷ Dwidyawati, A. (2022). *Implementasi Faktor-Faktor Kebijakan, Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Kepatuhan Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).

Syamsu (2012:7).³⁸

Faried Ali dan Andi Syamsu Alam (2012;115), mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). Pengertian ini dilihat dari kelompok sasaran akan tetapi bersama-sama dengan pelaku kebijakan, untuk melaksanakan keputusan, jika keputusan itu oleh pemerintah maka tindakan dimaksud adalah tindakan pemerintah. Kebijakan dimaknai sebagai tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, sebagai mana dikemukakan oleh Titmuss (1974) yang dikutip oleh Edi Suharto (2012;7) memberikan definisi tentang kebijakan adalah “sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Menurut Timuss, kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Oleh karena itu kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.³⁹

Faried Ali dan A.Samsu Alam (2012;33) memberikan pengertian bahwa “kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak dalam aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk aturan perundangundangan”. Pilihan

³⁸ Akram, H. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

³⁹ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam (2012;115), mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*).

alternatif yang dikehendaki oleh pemerintah yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Masa sekarang ini kebijakan ditujukan untuk mencapai tujuan, sebagai mana dikemukakan oleh Hoogerwerf 1983 (Faried Ali dan Andi Syamsu Alam 2012;16) menegaskan bahwa tujuan itu pada umumnya adalah untuk :

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).
2. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator). Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai koordinator).
3. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi alokasi.⁴⁰

Adapun kebijakan yang harus diimplementasi adalah Kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan untuk melindungi masyarakat terhadap resiko bencana yang lebih besar.

Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

⁴⁰ BEBASA, A. M. W. A. *Peranan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Urban Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Universitas Hasanudin. 2014

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Prasarana dan sarana tersebut antara lain jalan, jembatan, tanggul, penguatan tebing dan sebagainya. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup perbaikan infrastruktur dan perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.⁴¹

Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum memenuhi kebutuhan mengenai:

- b. Persyaratan keselamatan
- c. Persyaratan sanitasi
- d. Persyaratan penggunaan bahan bangunan
- e. Standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

Berdasarkan beberapa pendapat sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu makna bahwa implementasi kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai hubungan antara kebijakan pemerintah dengan program dan kegiatan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik.⁴²

⁴¹ AMAR, A. (2008). *Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁴² Ompusunggu, V. M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(2).

C. Kerangka Pemikiran

Evaluasi kebijakan pemerintah terkait penolakan masyarakat terhadap eksploitasi tambang batu dan pasir di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli terdiri dari dua indikator secara *Public Transcript* yaitu:

- a. Delegasi
- b. Perlawanan secara kelompok sosial.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang batu dan pasir yang meresahkan masyarakat, sehingga memunculkan tindakan penolakan eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli dari masyarakat agar perusahaan tersebut dihentikan beroperasi karena tidak memiliki izin yang jelas dan meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk tidak menerbitkan UIP Batuan kepada perusahaan apapun di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

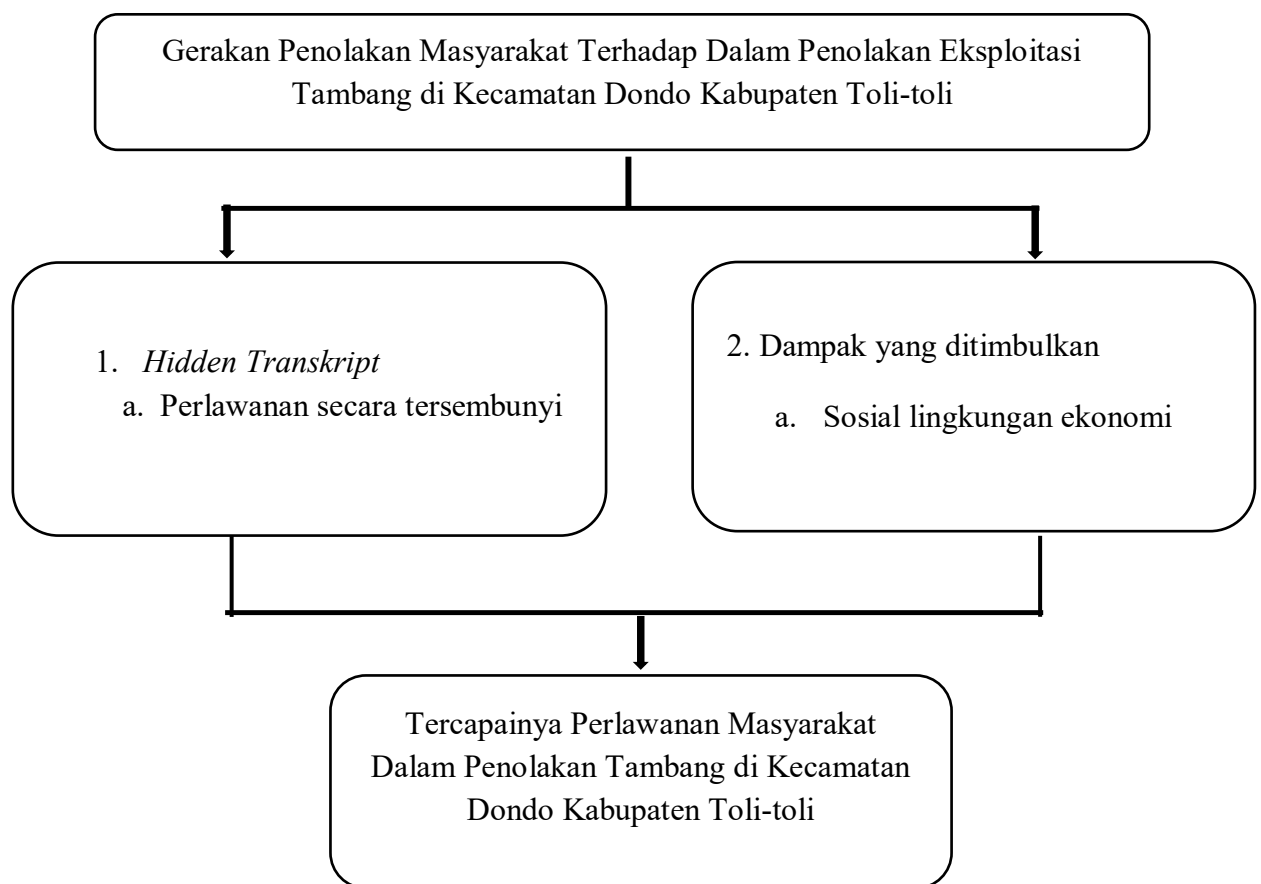
Alasan masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap eksploitasi tambang di kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli tersebut sangat beralasan karena selain tidak memiliki izin beroperasi, juga menimbulkan dampak yang beragam seperti:

- a. merusak cagar budaya
- b. pencemaran lingkungan
- c. rawan longsor
- d. matinya pasokan air
- e. pemadaman listrik.

Hal ini harus segera ditangani pemerintah daerah Kabupaten Dondo Kecamatan Toli-toli untuk menanggulangi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak tambang sehingga tercapainya perlawanan masyarakat dalam penolakan eksploitasi tambang.

GAMBAR 1

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Hasil Olah Data Penulis 2025

Berdasarkan kerangka fikir di atas maka fokus penelitian mengenai Analisis gerakan politik masyarakat dalam penolakan eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli yaitu : 1) *public transcrip* terdiri atas dua

poin : a) Perlawanan secara tersembunyi dan 2) Dampak yang ditimbulkan yaitu berdampak pada soisal ekonomi.

Alasan peneliti memilih dan tertarik untuk menggunakan salah satu teori James C. Scott yaitu *Hidden Transcript* yaitu melihat dari bentuk perlawanan yang tidak terlihat secara jelas oleh kelompok dominan, namun masih efektif dalam merusak atau mengurangi kekuasaan mereka. Contohnya, gosip, lelucon, ejekan, atau tindakan sehari-hari yang menantang norma atau aturan yang ditetapkan oleh kelompok dominan.

- a. *Hidden Transcip* adalah konsep yang dikembangkan oleh James C. Scott untuk menjelaskan cara-cara perlawanan yang dilakukan oleh kelompok tertindas terhadap kelompok dominan. Perlawanan ini seringkali dilakukan secara tersembunyi, tidak melalui jalur resmi, dan tidak selalu melibatkan tindakan kekerasan fisik.⁴³
- b. Dampak yang ditimbulkan adalah akibat, imbas atau pengaruh dari kegiatan industri yang mengganggu serta merusak kehidupan sosial dan alam.

⁴³ ADIL, A. A. (2017). Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kajian teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif, yang mana perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. Desain format penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yakni format deskripsi, format verifikasi, serta format *graded research*. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yakni penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang suatu keadaan dan gejala yang terjadi (Koenjaraningrat, 1993: 89). Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2007 : 6) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus, yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007 : 4), mengatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴

⁴⁴ Sulaiman, U. (2023). Aneka Jenis Penelitian. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-46.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan guna memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini dalam menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang mempermudah pengertian. Dalam metode ini membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, dan menginterpretasikan data-data dan pada akhirnya menyimpulkan. Dengan demikian, metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif (*interactive model analysis*) mengacu dari pendapat Miles and Huberman (1992:20) yang prosedurnya sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*);
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Kesimpulan Data (*Conclusion Data/Drawing/Verification*)⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli. Dipilihnya lokasi ini karena pertimbangan menjadi lokasi yang diteliti oleh penulis tentang Analisis Gerakan Politik Masyarakat Terhadap Penolakan Eksploitasi Tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli. Peneliti melakukan penelitian karena dari pihak

⁴⁵ Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

pemerintahan belum ada mendengarkan keluhan masyarakat setempat yang disebabkan oleh tambang ilegal yang berada di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak di perlukan, karena peneliti sebagai instrument utama atau alat dari penelitian itu sendiri. S. Margono mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia yang dalam hal ini peneliti sebagai alat pengumpul data. Peneliti membuat modifikasi untuk memperhitungkan keadaan setempat. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan serta peran, karena peranan penelitalah yang menemukan keseluruhan skenarionya, serta menceritakan tentang yang di lakukan oleh orang-orang dalam situasi Ketika peneliti mengadakan pengamatan. Penelitian harus memastikan data yang diperoleh dilapangan adalah data yang valid.⁴⁶

Dengan demikian maka untuk mendapatkan data dan informasi yang seakurat mungkin peneliti akan menginterview subjek penelitian yang telah ditentukan, serta mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh subjek, mencatat dan mendokumenstasi berbagai informasi yang sekiranya diperlukan.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat penting untuk menggali berbagai informasi melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan oleh penelitian secara langsung dan berulang-ulang sehingga data yang di peroleh benar-benar valid. Kehadiran penelitian di

⁴⁶ Sinaga, D. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif).

lapangan dilakukan secara legal setelah mendapatkan izin penelitian dari pihak perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Islam Negeri (UIN) Datokrama Palu. Surat izin penelitian kemudian mendapat respon yang baik dari pihak masyarakat dan pihak-pihak yang di wawancarai.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah sarana utama bagi penulis untuk memecahkan masalah. Selama penelitian fakta dan informasi dikumpulkan keadaan database yang disebut data yang selanjutnya diolah untuk membuat laporan penelitian (Muathofa 2022). Sumber data merupakan tempat atau individu yang memberikan data maupun informasi selama penelitian (Nurdin Ismail 2019). Suharsi arikunto (2002) menegaskan bahwa subyek darimana asal data diperoleh itulah yang dimaksud sumber data dalam penelitian. Informasi yang dikumpulkan sebagai data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder (Nurdin Ismail 2019). Adapaun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan Tindakan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data terdiri dari data dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic.⁴⁷ Penulis mengumpulkan semua data yang kemudian disajikan dalam proposal sebagai usaha dalam pengambungan apa yang dilihat dan didengar serta dicatat secara rinci sehingga data-data yang diperoleh menjadi valid (dapat dipertanggung jawabkan). Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas:

1. Sumber data utama (data primer)

⁴⁷ Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).

Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil Peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Laporan dalam bentuk dokumen juga menjadi data yang diperoleh penelitian selama proses penelitian kemudian diolah bersama data lain. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru, dalam hal ini sumber data utamanya adalah masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli dan tokoh-tokoh yang berkaitan langsung dengan penolakan tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

2. Sumber data sekunder

Data pendukung atas dan utama yang telah di peroleh disebut dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan mater penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan melihat secara langsung pada objek penelitian melalui pengamatan. Observasi sebagai strategi pengumpulan data yang melibatkan pencatatan secara sistematis terhadap terhadap fenomena yang

diteliti sambil melakukan pengamatan langsung terhadapnya. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli untuk pengambilan data sehingga lebih menambah keabsahan data yang diperoleh.⁴⁸

Teknik observasi secara langsung yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung tanpa bantuan dari gejala subjek yang sedang diteliti pada kondisi alami maupun buatan.⁴⁹

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dan sebagai upaya mencocokkan data yang diperoleh. Wawancara mengacu pada proses pengumpulan informasi melalui interaksi langsung antara pengumpul data dan subjek penelitian atau sumber data (Akmad Tanzeh 2019).⁵⁰

Dengan demikian maka teknik wawancara merupakan teknik yang penulis gunakan dalam Upaya memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara langsung antara penulis dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat serta dapat langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-

⁴⁸ Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.

⁴⁹ Abubakar, H. R. I. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

⁵⁰ Yufrinalis, M., & Fil, S. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang lengkap tentang Analisis gerakan masyarakat dalam penolakan eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli. Instrument penelitian yang digunakan dalam interview alat tulis menulis untuk transkrip wawancara.

Adapun yang peneliti wawancara sebagai narasumber adalah :

- a) Bapak Simon selaku Kasarpras Kecamatan Dondo
- b) Bapak Jusman selaku Kepala Desa Ogowele Kecamatan Dondo
- c) Bapak Adnan selaku Kepala Desa Malulu Kecamatan Dondo
- d) Bapak Syahrul selaku salah satu karyawan tambang CV. Rajawali
- e) Mohammad Taufan selaku aktivis mahasiswa
- f) Ibu Siti Aminah, salah satu Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah dekat pertambangan

Informan yang akan menjadi fokus peneliti adalah enam orang, dengan durasi wawancara 10 sampai 15 menit per orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar kutipan dan Bahasa referensi lain yang ada di lokasi penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk memberikan kelengkapan data dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung ke objek yang di teliti, dokumentasi biasanya diperlukan untuk memberikan gambaran penegasan bahwa penelitian yang dilakukan terjamin keasliannya dengan mencantumkan bukti berupa gambar,

video ataupun foto. Teknik dokumentasi biasanya membutuhkan alat pendukung lainnya seperti rekaman dan dokumentasi.⁵¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif banyak dilakukan ketika proses penelitian dilakukan di lapangan. Meski demikian, analisis data sudah dilakukan sejak sebelum turun ke lapangan yang dimulai ketika merumuskan masalah hingga selesainya penelitian di lapangan.⁵²

Analisis data menurut penulis adalah pemilahan data untuk memilah mana data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data yang akurat dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan terkait topik penelitian sehingga memudahkan orang lain untuk memahami data tersebut.

Tiga alur yang digunakan dalam teknik analisis data yaitu: Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Berikut ini penulis tuliskan secara rinci mengenai teknik analisis data sesuai pendapat Miles dan Huberman.⁵³

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan yang berkonsentrasi pada penyederhanaan, abstraksi dan mengubah data yang belum diproses yang

⁵¹ Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵² Ibid. Halaman 15

⁵³ Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

dihasilkan dari catatan lapangan.⁵⁴ reduksi data adalah proses memilah dan memisahkan data dengan cara mengolah data yang tidak relevan dalam upaya memusatkan data pada analisis gerakan masyarakat dalam penolakan eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

Mengklasifikasikan atau mengkategorikan data pada setiap level menggunakan deskripsi ringkas, melakukan lebih banyak analisis, menyusun ulang, menghapus informasi yang tidak dibutuhkan, dan mengatur data agar dapat divalidasi adalah proses reduksi data. Semua data yang terdapat pada rumusan masalah penelitian termasuk data yang direduksi. Peneliti mereduksi data hasil wawancara dengan membuang atau mengurangi kata-kata atau bahasa yang tidak relevan dengan penelitian ini.

Reduksi data dapat menjadi tolak ukur sejauh mana penelitian berjalan dengan mengambil data secara spesifik dapat mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan selanjutnya.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Pemilahan data hasil reduksi kemudian diberikan narasi pada peneliti untuk pengambilan keputusan sebagai bagian dari penyajian data pada penelitian kualitatif. Penyajian data hasil reduksi dilakukan dalam bentuk-bentuk tertentu seperti narasi, bagan, skema agar lebih mudah dalam memahami apa yang sudah terjadi dan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan pada tahapan berikutnya.

⁵⁴ Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

3. Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data maka dilakukan tahapan penarikan kesimpulan awal. Kesimpulan awal dapat berubah jika tidak didukung bukti-bukti yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk menghindari kesalahan dalam penarikan kesimpulan maka peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah dilakukan pengecekan data secara cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dan data yang tidak valid. Penarikan kesimpulan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang berbentuk deskriptif.⁵⁵

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mengetahui tingkat kredibilitas dan validitas data. Pengecekan keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan bukan sekedar argumentasi dan asumsi. Pengecekan keabsahan data dilakukan peneliti dengan triangulasi data.

Triangulasi data yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat jenis triangulasi sebagai teknik pengecekan yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.⁵⁶

Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dengan beberapa metode triangulasi, antara lain:

⁵⁵ Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.

⁵⁶ Husnulloil, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan yaitu: membandingkan data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data dan; pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data, memanfaatkan pengamat lainnya, membantu mengurangi kelencengan dalam pengumpulan data.

4. Triangulasi dengan teori, hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk

mencari tema atau penjelasan pembandingan atau penyaing. Hal ini dapat dilakukan secara induktif atau secara logika (Lexy J. Moleong 2013).⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa triangulasi merupakan usaha untuk memperoleh data yang kredibel dan valid dengan cara menggunakan perbandingan data dengan sesuatu selain data itu sendiri. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan data berupa triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli maupun terhadap pihak terkait dengan penelitian sebagai informan utama dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Tujuan perbandingan ini untuk mengetahui apakah sama antara hasil wawancara yang diperoleh dengan hasil observasi yang dilakukan.

⁵⁷ Ical, M. (2023). *Analisis Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Martadinata Indah Di Kecamatan Sindue Tobata* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggal 14 Juli 2018 Aktivitas pertambangan pasir, batu dan kerikil di desa malulu kecamatan dondo kembali beroperasi, setelah beberapa minggu berhenti, aktivitas pertambangan ini di duga ilegal karena tidak mengantongi izin dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (DESDM), karena berdasarkan rilis surat dinas ESDM pada tanggal 9 mei 2018 dengan Nomor: 540/50.32 – Minerba/ DESDM, Perihal Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan s/d Maret 2018, yang di berikan kepada JATAM SULTENG, Baik IUP yang tahap eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi tidak ditemukan satu Malulu Kecamatan Dondo. sehingga kami menduga aktivitas pertambangan yang beroperasi sampai saat ini di desa malulu adalah aktivitas Ilegal.⁵⁸

Perlawanan kelompok masyarakat ini menimbulkan ketegangan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Pada bab ini akan memuat mengenai pembahasan hasil penelitian, dimana akan dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk-bentuk perlawanan masyarakat di Kecamatan Dondo desa Malulu terhadap kebijakan Ijin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

⁵⁸ Jatam Sulteng (2018). *Aktivitas Tambang Ilegal Desa Malulu Kecamatan Dondo Kembali Peroperasi*. Diakses (<https://jatamsulteng.org/aktivitas-tambang-ilegal-desa-malulu-kecamatan-dondo-kembali-beroperasi-aparat-penegak-hukum-harusnya-tidak-tutup-mata/>) 3 Agustus 2025

A. Gambaran Umum Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli

a) Sejarah Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli

Dikutip dari Wikipedia, Desa Malulu di Kabupaten Toli-toli tidak memiliki informasi sejarah yang spesifik tersedia secara online. Namun, berdasarkan informasi umum tentang Kabupaten Toli-toli, desa ini termasuk dalam wilayah yang dihuni oleh suku Toli-toli. Asal usul nama Toli-toli sendiri dikaitkan dengan legenda tiga manusia kayangan yang turun ke bumi.

Mengenai asal usul nama Toli-toli, menurut legenda, berasal dari kata Totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Toli-toli berasal dari 3 manusia kayangan yang menjelma ke bumi ini masing-masing melalui: *Olisan Bulan* (bambu Emas), *Bumbung Lanjat* (puncak pohon Langsat), dan *Ue saka* (sejenis Rotan). Yang menjelma *Olisan Bulan* di Kenal sebagai *Tau Dei Baolan* atau *Tamadika Baolan*. Sepanjang sejarah yang diketahui, Tolitoli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama islam, sekitar abad ke-17, yang dibawa mubalig dari kesultanan ternate.

Kemudian nama Totolu (*Tau Tolu*) berubah menjadi Tontoli sebagaimana yang tertulis dalam Lange-Contrack 5 juli 1858 yang ditandatangani antara Dirk Francois dari pihak belanda dengan Raja Bantilan Syafiuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Tolitoli, seperti yang terlihat dalam penulisan *Korte verklaring*

yang di tandatangi Raja Haji Mohammad Ali dengan pemerintah Hindia Belanda, yang ketika itu ibu kota kerajaan berpusat di Nalu.⁵⁹

b) Letak Geografis dan Sosial Masyarakat Kabupaten Tolitoli



Gambar.2 Peta Kabupaten Tolitoli

Kabupaten Tolitoli terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara geografis letaknya berada di antara 0°35' - 1°20' Lintang Utara dan 120° - 122°09' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Buol di sebelah timur dan utara, Selat Makassar di sebelah barat, serta Kabupaten Parigi Moutong di sebelah selatan. Secara astronomis: 0°35' - 1°20' Lintang Utara dan 120° - 122°09' Bujur Timur. Adapun batas wilayah sebelah timur Kabupaten Buol, sebelah barat Selat Makassar, sebelah utara Laut Sulawesi dan Kabupaten Buol, dan sebelah Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dengan luas wilayah 4.079,77 km.

Terdiri dari 73 Desa, 5 Kelurahan dan 10 Kecamatan. Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah Bahasa Geiga. Bahasa ini menurut Ahli Bahasa AC Kruyt dan DR Adriani termasuk dalam kelompok Bahasa Tomini, yang daerah sebarannya antara Desa Towera di daerah Kabupaten Donggala sampai dengan Desa

⁵⁹ Portal Resmi Kabupaten Tolitoli. 2023. *Tolitolikab.go.id*. Diakses (<https://www.tolitolikab.go.id/p/sejarah>) 2 Agustus 2025

Molosipat diperbatasan Gorontalo. Dengan mata pencaharian utama di Kabupaten Tolitoli adalah pertanian, dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Selain itu, peternakan dan perikanan juga menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat setempat.⁶⁰

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Toli-toli

Tabel.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah Peduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kab. Tolitoli (jiwa)		
	Laki-laki (2023)	Perempuan (2023)	Jumlah (2023)
Dampal Selatan	11.019	10.695	21.714
Dampal Utara	7.129	6.802	13.931
Dondo	11.784	11.182	22.966
Ogodeide	6.397	6.021	12.418
Basidondo	5.611	5.221	10.832
Baolan	34.678	34.008	68.686
Lampasio	6.869	6.207	13.076
Galang	18.68	17.959	36.639
Tolitoli Utara	9.364	9.112	18.476
Dako Pemean	4.983	4.92	9.903
Kabupaten Tolitoli	116.514	112.127	228.641

Sumber: BPS; 2013, 2014 & 2015 : Angka Estimasi; 2021, 2022 & 2023 : Proyeksi Penduduk Hasil SP2020.⁶¹

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh peneliti peroleh jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli Adalah 228.641 jiwa, yang terdiri dari 116.514 jiwa laki-laki dan 112.127 jiwa Perempuan.

⁶⁰ Profil Kabupaten Tolitoli. BPK Perwakilan Sulawesi Tengah. Diakses (<https://sulteng.bpk.go.id/profil-kabupaten-tolitoli/>) 2 Agustus 2025

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Tolitoli (2022)*. Diakses (<https://tolitolikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tolitoli.html>) 2 Agustus 2025

2. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Toli-toli

Mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Tolitoli adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu terdapat juga sektor perdagangan, pertambangan dan jasa yang cukup berkembang di daerah ini.

Tabel.3

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tolitoli (2023)

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	23.419	9.667	33.086
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	10.428	4.457	14.885
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.717	679	3.393
Buruh/Karyawan/Pegawai	19.607	13.812	33.419
Pekerja bebas pertanian	4.105	1.500	5.605
Pekerja bebas non pertanian	3.621	101	3.722
Pekerja keluarga/tidak dibayar	7.201	10.669	17.870
Jumlah	71.098	40.882	111.980

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)⁶²

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tolitoli mencukupi kebutuhan hidup dengan berusaha sendiri atau membuka usaha sendiri seperti membuka jasa bengkel, membuka toko dengan menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari Masyarakat desa, dan lainnya dengan total jumlah 33.086 orang. Pekerja bebas non pertanian salah satunya adalah Masyarakat desa yang ikut bekerja di daerah pertambangan dengan total 3.722 orang.

⁶² Kabupaten Tolitoli Dalam Angka. *Tolitoli Regency In Figures*. 2024. Diakses (<https://api.tolitolikab.go.id/storage/unduhans/UP2hYEICmeUYzUzAzDTXkHKHCw98ypIQGhTuh221.pdf>) 3 Agustus 2025

Mata pencaharian penduduk Kabupaten toli-toli terdapat 5.605 orang yang bekerja sebagai petani. Para petani di Kabupaten Tolitoli hanya memiliki satu sumber perairan untuk kebutuhan perairan di persawahan mereka yaitu Sungai yang membentang Panjang kurang lebih sekitar 50 kilometer. Namun karena hadirnya pertambangan pasir dan batu di desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli telah mengakibatkan para petani terancam secara ekonomis, menghancurkan penahan aliran air yang melindungi lahan pertanian masyarakat. Hancurnya penahan aliran air tersebut mengakibatkan areal pertanian yang berdekatan dengan lokasi pertambangan tergenang oleh air sungai yang mengakibatkan lahan pertanian masyarakat menjadi rusak.

Selain dengan alasan rusaknya lahan pertanian, masyarakat setempat juga dikeluhkan dengan kotornya sumber air yang mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, mengingat Sungai itulah satu-satunya sumber air bersih yang ada di Kabupaten Tolitoli khususnya desa Malulu. Alasan yang bersifat materialis kemudian menjadi salah satu dasar kuat bagi Masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap keberadaan pertambangan pasir dan batu di Desa Malulu.

B. Pertambangan Pasir dan Batu di Desa Malulu Kabupaten Tolitoli

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak

dan bijih mangan.⁶³ Kegiatan pertambangan memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, sektor pertambangan penting dikaji karena kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik.

Naiknya harga pasir di pasaran internasional sebesar 50 persen dari harga 25 US Dolar persatu ton ditahun sebelumnya menjadi 55 US Dolar persatu ton pada tahun 2009 membuat perusahaan nasional maupun internasional tertarik untuk menanamkan investasi dan melakukan pertambangan di Kabupaten Lumajang. PT Indo Modern Mining Sejahtera (PT IMMS) merupakan konsorium perusahaan finansial Hani Group dan Siberian Mining Group yang keduanya bermarkas di Hong Kong. PT IMMS pimpinan Lam Chong Sam mulai masuk Kabupaten Lumajang sejak 2010 bermodal SK Bupati Lumajang mengenai IUP Eksplorasi 503/436/427.14/2010 seluas 1.195 Ha yang mengajukan rancangan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk eksplorasi pasir besi di Pantai Wotgalih,⁶⁴ namun dapat penolakan dari masyarakat desa Malulu karena menganggap aktivitas pertambangan tidak menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat dan belum lagi dampak sosial serta lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan di desa Malulu Kabupaten Tolitoli.

⁶³ Pertambangan BPS. 2013. *Pertambangan*. Diakses (bps.go.id/id/Subjek/view/id/10) 3 Agustus 2015

⁶⁴ JATAM – WALHI JATIM. *Carut Marut Pengelolaan Pesisir Selatan Lumajang. SelamatkanBumi*. Diakses (<http://selamatkanbumi.com/id/carut-marut-pengelolaan-pesisir-selatan-lumajang/>) 3 Agustus 2025

a) Gerakan Perlawanan Masyarakat Menolak Tambang Ilegal Di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli

Gerakan-gerakan tidaklah diciptakan, apalagi diluncurkan atau dipimpin oleh para pemimpin. Setiap kali ada kesempatan atau setiap kali muncul ketidakpuasan manusia yang melewati batas-batas kesabaran manusia, gerakan sosial timbul (muncul) dengan sendirinya dan terwujud dalam aksi- aksi dari kesadaran kolektivitas yang bersifat konfliktual

Gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Malulu terhadap tambang ilegal di Desa Malulu di dasarkan atas surat yang diberikan oleh dinas ESDM Provinsi Sulawesi tengah dengan mencantumkan beberapa lampiran IUP Batuan yang aktif Di semua Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ditemukan IUP CV. Rajawali yang melakukan aktivitas pertambangan di Desa malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dan IUP Batuan CV. Rajawali Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hanya berada di desa Tinigi Kecamatan Galang.⁶⁵

Sikap pemerintah kabupaten Tolitoli yang cenderung tidak terbuka dalam menetapkan kebijakan mengakibatkan lahirnya rasa ketidakpercayaan masyarakat. Pembuatan kebijakan yang seharusnya melibatkan organ-organ (aktor-aktor) yang cukup representatif bagi kepentingan publik. Namun pada penerapannya tidak dilibatkan secara intens oleh pemerintah kabupaten Tolitoli.

“Sebenarnya pada prinsipnya saya melihat bahwa persoalan yang paling fundamental itu karena memang kurangnya dilibatkannya masyarakat oleh pemerintah daerah. Dari hasil diskusi tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, bentuk sosialisasinya seperti apa. Ternyata dari hasil

⁶⁵ Ibid. Halaman 2

kesimpulan kita bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu relatif tidak intens dan tidak mengenai semua strata maupun elemen masyarakat, hanya orang-orang tertentu, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat yang di undang untuk melakukan sosialisasi, sementara di tengah- tengah masyarakat ini ada beberapa kelompok masyarakat seperti mahasiswa, sarjana, yang notabene ingin diakui dan dilibatkan namun dikesampingkan oleh pemerintah dalam sosialisasi”.⁶⁶

Seperti yang di definisikan oleh Scott bahwa perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (minsalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka.

Kenyataan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, dimana masyarakat mengetahui keberadaan pertambangan melalui informasi dari Masyarakat sekitar dan beberapa organisasi perkumpulan anak muda di daerah Malulu. Kemudian masyarakat beserta mahasiswa yang berada di Kabupaten Tolitoli melakukan penelusuran mengenai kebenaran dari informasi tersebut. Setelah melakukan investigasi tentang keberadaan pertambangan ini bahwa benar di Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli menjadi lokasi tambang. Dilain pihak, Setelah dilakukan investigasi oleh Masyarakat. ditemukanlah beberapa pertambangan di wilayah tersebut yang beroperasi hingga saat ini tanpa adanya surat Izin Usaha Pertambangan (IUP).

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Simon Selaku Kasi Sarpras sekaligus Tokoh masyarakat di Kecamatan Tolitoli

Berdasarkan hasil investigasi Jatam Sulteng dilapangan, telah ditemukan aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh CV. Rajawali, dengan diangkutnya keluar beberapa material menggunakan dam truk dari areal pertambangan tersebut, aktivitas eksploitasi ini sangat bertentangan dengan Surat yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor:540/5032-Minerba/DESDM, Perihal Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan s/d Maret 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2018, setelah Jatam mengirimkan surat Permintaan Daftar IUP Batuan Yang Aktif, baik yang dalam tahapan ekplorasi maupun yang eksploitasi.⁶⁷

Dalam surat yang diberikan oleh dinas ESDM Provinsi Sulawesi tengah dengan mencantumkan beberapa lampiran IUP Batuan yang aktif Di semua Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ditemukan IUP CV. Rajawali yang melakukan aktivitas pertambangan di Desa malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dan IUP Batuan CV. Rajawali Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hanya berada di desa Tinigi Kecamatan Galang.⁶⁸

Dari pernyataan Jatam Sulteng yang dirilis pada tahun 2018 tersebut, hingga saat ini masyarakat setempat menyatakan bahwa pertambangan CV. Rajawali yang berada di Desa Malulu masih beroperasi sedangkan belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan resmi dari pemerintah setempat.

⁶⁷ Ibid. Halaman 1

⁶⁸ Ibid

”Mengenai surat izin sampai sekarang belum keluar. Kemungkinan surat izinnya keluar di tahun depan, sekitar di antara bulan dua atau bulan tiga. Itupun masih tanda tanya apakah tetap diizinkan beroperasi atau tidak.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan dari salah satu Masyarakat yang bekerja di tambang CV. Rajawali, peneliti menyimpulkan bahwa pertambangan masih aktif hingga tahun 2025 saat ini.

C. Hasil Dan Pembahasan Bentuk Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang di Desa Malulu Kecamatan Dondo

a) Perlawanan Tidak Terorganisir

Perlawanan tidak terorganisir mengacu pada bentuk perlawanan sosial, politik, atau budaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil tanpa adanya struktur, koordinasi, atau kepemimpinan formal. Teori ini banyak dikembangkan dalam kajian ilmu sosial dan politik, terutama oleh para pemikir seperti James C. Scott dalam bukunya "Weapons of the Weak" (1985).⁷⁰

Perlawanan tidak terorganisir terjadi dalam konteks ketimpangan kekuasaan, di mana pihak yang tertindas atau memiliki posisi lemah melakukan tindakan-tindakan kecil, tersembunyi, dan tidak mencolok untuk menentang dominasi pihak berkuasa. Karakteristik perlawanan tidak terorganisir :

⁶⁹ Wawancara Bapak Mohammad Syahrul, salah satu masyarakat yang bekerja di tambang CV. Rajawali.

⁷⁰ Arabella, Sophia, Dzarna Dzarna, and Dina Merdeka Citraningrum. "Representasi Perlawanan Tokoh Mahasiswa Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori." *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 12.1 (2024): 180-195.

- a. Berskala kecil dan sering kali tidak langsung (misalnya sabotase diam-diam)
- b. Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari
- c. Tujuannya adalah mengganggu, melemahkan, atau mempertahankan martabat di bawah tekanan kekuasaan.

Perlawanan tidak terorganisir adalah cara diam-diam, tidak langsung, dan tersembunyi yang digunakan oleh kelompok lemah atau untuk mempertahankan harga diri, merusak dominasi, atau menolak keadilan tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka atau Gerakan massa.⁷¹ Meskipun bentuknya kecil, dampaknya bisa akumulatif dan menjadi dasar bagi perlawanan yang lebih besar atau terorganisir di masa depan.

Mengetahui masih adanya aktivitas pertambangan di Desa Malulu, aktivis mahasiswa beserta masyarakat mulai mempertanyakan kepada Kepala Desa masing-masing dan meminta menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap izin usaha pertambangan. Dengan adanya pernyataan tersebut, peneliti mencoba untuk meminta tanggapan langsung dari kepala desa Malulu Kecamatan Dondo.

“Kalau soal pertambangan CV. Rajawali, sudah pernah dibahas langsung dan mengadakan pertemuan. Dan pertemuan di hadiri oleh 16 desa dan beberapa Masyarakat perwakilan dari masing-masing desa, dan beberapa karyawan pertambanngan. Pertemuannya membahas tentang dampak yang dapat terjadi jika tambang tersebut tetap diizinkan beroperasi. Dan timbul

⁷¹ Susilowati, Enik Zuni, and Titik Indarti. "Resistensi perempuan dalam kumpulan cerita tandak karya royyan julian (Teori resistensi-James C. Scott)." *Surabaya: Universitas Negeri Surabaya* (2018).

lah perdebatan antara Masyarakat dan pihak pertambangan. Dasi sisi Masyarakat menyatakan semua dampak yang ditimbulkan jika pertambangan tetap diizinkan beroperasi, seperti yang paling dikeluhkan Masyarakat adalah sumber air menjadi kotor mengingat Sungai itu adalah satu-satunya tempat pembuangan limbah pertambangan. Namun dari pihak pertambangan menyatakan bahwa jika pertambangan nantinya akan tetap diizinkan beroperasi, maka akan dibuatkan saringan pembuangan agar air Sungai tidak tercemar. Dan pihak Perusahaan tambang juga menjanjikan kepada Masyarakat bahwa jika Perusahaan diizinkan beroperasi, pihaiik perusahaa akan mengutamakan warga setempat untuk menjadi pekerja di pertambangan tersebut agar menjadi kesempatan untuk anak-anak muda bergabung dengan perusahaan.”⁷²

Kepala Desa Malombak Kecamatan Dondo juga menyatakan bahwa telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan yang membahas tentang pertambangan pasir dan batu tersebut. Sebelum mengadakan pertemuan-pertemuan antar desa, Masyarakat juga telah melakukan perlawanan. Namun perlawanan ini masiih bersifat sembunyi-sembunyi dan hanya menimbulkan riak-riak kecil. Perlawanan secara sembunyi- sembunyi merupakan perlawanan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kawan dan lawan dan hanya melibatkan aktor-aktor secara individu.

Seperti yang di ungkapkan oleh Scott bahwa perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, bersifat oportunistik dan mementingkan

⁷² Wawancara kepada Bapak Jusman selaku Kepala Desa Malombak Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli

diri sendiri, tidak berkonsekuensi revolusioner, atau lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.

Hal ini ditemukan dari tindakan yang dilakukan oleh beberapa aktivis mahasiswa yang belajar di kota seperti Syahrul, Mohammad Ansar, Arman dan beberapa mahasiswa lainnya. Mereka melakukan diskusi dan kajian rutin untuk membahas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menolak kebijakan izin usaha pertambangan ini. Arman mengatakan:

“kita mencoba memberikan penyadaran terhadap masyarakat dan kepada aparat desa ini, tentang bagaimana pertambangan ini akan merusak lingkungan, kemudian akan merusak sumber kehidupan bagi masyarakat dan masyarakatnya akan menjadi buruh tambang nantinya. Sehingga ada kemudian kesadaran masyarakat setelah mahasiswa masuk ke setiap desa saat itu”.⁷³

Dari pernyataan saudara Arman, peneliti menemukan bahwa gerakan penolakan secara tersembunyi dengan menyatakan pendapat kepada Masyarakat dapat memanfaatkan jaringan kekerabatan dari setiap anggota kelompok sebagai sumber dukungan dan perekrutan anggota baru maupun simpatisan dalam perjuangan.

Seperti yang dikemukakan oleh McAdam dalam teori mobilisasi sumber daya, bahwa dengan mempergunakan mekanisme mobilisasi mikro, dia ingin menyatakan bahwa hubungan faktor formal dan informal diantara masyarakat dapat menjadi sumber solidaritas dan memfasilitasi struktur komunikasi ketika mereka mengidentifikasi perbedaan kebijakan pemerintah secara bersama-sama.

⁷³ Wawancara dengan Arman 28 Agustus 2025 (salah satu masyarakat desa malulu)

Infrastruktur sosial ini dipercaya secara luas memainkan peranan penting terciptanya gerakan social. Arman juga mengatakan:

“Mahasiswa melakukan pergerakan pada saat itu, yaitu menyebarluaskan informasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh pertambangan tersebut supaya masyarakat sadar akan terjadinya kerusakan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia di kecamatan Dondo”.⁷⁴

Aktifis mahasiswa juga melakukan identifikasi terhadap aparat desa yang menolak maupun yang menerima masuknya perusahaan tambang tersebut. Kegiatan penyadaran yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat respon yang baik dari masyarakat. Dimana masyarakat mulai menyamakan persepsi tentang bagaimana cara yang akan dilakukan untuk menolak perizinan perusahaan tambang dikecamatan Dondo Desa Malulu.

Selain mendengar suara dari beberapa aktivis mahasiswa, peneliti juga mencoba untuk langsung mewawancarai beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Dondo. Dan mendapatkan respon yang beragam, seperti beberapa setuju dengan pendapat mahasiswa yaitu dampak yang akan ditimbulkan jika Perusahaan diizinkan beroperasi, ada beberapa tidak mau mengeluarkan pendapat dengan alasan tidak mengetahui keberadaan tambang di Kecamatan Dondo, dan ada juga beberapa yang setuju dengan mahasiswa namun memikirkan lapangan pekerjaan yang bisa berguna untuk anak-anak muda sekitar. Bukan hanya aparat desa, Masyarakat juga mengemukakan berbagai pendapat dan sebagian besar Masyarakat menolak dengan keberadaan tambang di kecamatan Dondo.

⁷⁴ Wawancara kepada Arman 28 Agustus 2025 (salah satu masyarakat desa malulu)

Dari beberapa masyarakat ada juga yang menolak untuk ikut berpartisipasi pada setiap program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat lebih memilih tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Bahkan jika dipanggil oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, masyarakat memberikan alasan hendak pergi ke sawah atau ke kebun. Penolakan-penolakan tersebut merupakan reaksi dari kurang memperhitungkan adanya pendapat yang berbeda dari masyarakat.

Menurut Scott, tindakan inilah yang diartikan sebagai sebuah perlawanan simbolik, dimana pelanggaran yang dilakukan secara tidak langsung akan menggerogoti kekuasaan. Aturan pemerintah tidak lagi dipandang sebagai sebuah nilai yang harus dipegang bersama. Secara simbolik aturan pemerintah adalah salah satu bentuk kekuasaan Negara dalam mengatur masyarakat. Namun dengan hadirnya pelanggaran sebagai bentuk perlawanan masyarakat, kekuasaan Negara telah dikikis secara bertahap dan kehilangan citranya di masyarakat. Terutama dimata pelaku pelanggaran, hadirilah anggapan bahwa aturan bisa dilanggar, kemudian pelanggaran lainnya akan muncul bila tidak ada tindak tegas terhadap pelakunya.

Adanya informasi yang masyarakat dengar tentang akan keluarnya surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di tahun yang akan datang, pembangkangan oleh masyarakat di Kecamatan Dondo, Desa Malulu Kabupaten Tolitoli terus dilakukan dalam bentuk tidak melibatkan diri dalam segala kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan tambang sebagai wujud penolakan terhadap izin usaha pertambangan.

Peneliti juga mencoba untuk mewawancarai langsung pekerja yang berada di CV. Rajawali, dan peneliti mendapatkan fakta baru seperti yang diungkapkan Mohammad Syahrul salah satu pekerja di Perusahaan tambang tersebut:

“Sebenarnya ada tambang emasnya di bagian atas pertambangan pasir yang lahannya tidak jauh dari pertambangan pasir hanya jarak beberapa meter. Tapi masih disembunyikan agar masyarakat tidak tahu dan tidak banyak berkomentar tentang pertambangan ini. Kalau masyarakat tahu, bisa-bisa makin banyak masyarakat yang menolak dan makin berani mengeluarkan Gerakan penolakan tambang ini.”⁷⁵

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jika pertambangan tetap diizinkan beroperasi sampai keluarnya surat izin usaha pertambangan (IUP) maka dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat akan semakin parah dan semakin berpengaruh buruk kepada ekonomi dan hasil pertanian masyarakat di kecamatan Dondo, mengingat mata pencaharian masyarakat sekitar mayoritas adalah petani.

b) Alasan Masyarakat Dondo Menolak Pertambangan di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli

Penolakan Masyarakat Kecamatan Dondo menolak eksploitasi tambang tidak lain karena mengingat dampak yang akan merugikan masyarakat yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika dilokasi

⁷⁵ Wawancara Mohammad Syahrul Selaku salah satu pekerja di pertambangan CV. Rajawali, 28 Agustus 2025

tambang tersebut jika berlangsung pada musim kemarau. Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk yang melintas, dan suara mesin pemompa pasir yang menunjang aktivitas pengerukan atau penambang.⁷⁶

Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya alat atau mesin mesin berat seperti truk yang mengangkut pasir tersebut menggunakan alternatif jalan raya membuat jalan raya semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkutan tersebut melebihi kapasitas yang ditentukan. Kerusakan juga terjadi pada warga yang memiliki kendaraan bermotor karena truk yang membawa pasir dari sungai membuat tergenangnya jalan selok oleh air sungai sehingga kendaraan bermotor berkarat. Selain itu juga pengangkutan bobot beban yang berlebihan membuat truk pasir berjalan dengan kecepatan rendah, sempitnya jalan membuat kendaraan lain terganggu seringkali menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama di jalur utama Desa. Seringkali juga kecelakaan terjadi didekat sekolah – sekolah di Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai dampak aktivitas pertambangan pasir di Desa Malulu, bukannya meningkatkan taraf hidup dan kesejaheteraan masyarakat. Sebaliknya, justru menciptakan masalah baru yang tidak didambakan masyarakat : masalah sosial, lingkungan dan ekonomi. Secara khusus pada bab ini telah disoroti mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Malulu dan kehadiran kelompok penambang ilegal menimbulkan berbagai

⁷⁶ Wawancara Sitti Aminah selaku Masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan daerah pertambangan, 30 Agustus 2025

macam persoalan lingkungan, sosial dan ekonomi terutama pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia.

Aktivitas pertambangan juga mengancam areal irigasi yang digunakan warga desa malulu untuk mengairi areal persawahan, sehingga jika aktivitas pertambangan ilegal ini terus dilanjutkan maka masyarakat desa malulu akan kehilangan areal persawahan mereka, yang menggantungkan kebutuhan air di irigasi tersebut. Berikut poin-poin yang dapat peneliti simpulkan mengapa masyarakat Kecamatan Dondo menolak eksploitasi tambang:

1. Dampak Terhadap Keseharian dan Kualitas Hidup Warga

Masyarakat Kecamatan Dondo menolak eksploitasi tambang karena kegiatan tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, khususnya:

- a. Peningkatan debu di sekitar kawasan tambang, terutama saat musim kemarau, akibat tiupan angin dan aktivitas truk pengangkut pasir.
- b. Penurunan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
- c. Peningkatan kebisingan dari mesin pemompa pasir dan kendaraan berat yang lalu lalang setiap hari.

2. Kerusakan Infrastruktur Jalan

Eksploitasi tambang juga menyebabkan kerusakan jalan yang menjadi jalur utama warga, terutama karena:

- a. Truk-truk pengangkut pasir melebihi kapasitas muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan.
- b. Jalan menjadi tergenang air akibat pengambilan pasir dari sungai, menyebabkan korosi (berkarat) pada kendaraan bermotor milik warga.

- c. Pengangkutan pasir dengan kecepatan rendah di jalan sempit menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

3. Ancaman terhadap Keselamatan Warga

Kondisi jalan yang rusak dan padat oleh truk tambang turut meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya:

- a. Dekat area sekolah di Desa Malulu, sehingga mengancam keselamatan anak-anak sekolah.
- b. Di jalur utama desa yang sering digunakan warga untuk aktivitas harian.

4. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Alih-alih meningkatkan taraf hidup masyarakat, aktivitas pertambangan malah menciptakan masalah baru, seperti:

- a. Konflik sosial antara warga dan penambang.
- b. Kerusakan lingkungan, seperti degradasi sungai dan irigasi.
- c. Ketimpangan ekonomi, karena keuntungan tambang tidak dirasakan merata oleh masyarakat.

5. Kehadiran Penambang Ilegal dan Pelanggaran Hak Asasi

Aktivitas tambang di Kecamatan Dondo sebagian besar dilakukan oleh kelompok penambang ilegal yang:

- a. Tidak memiliki izin resmi dan tidak mengikuti aturan lingkungan.
- b. Menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, karena merugikan masyarakat tanpa persetujuan mereka.

6. Ancaman terhadap Irigasi dan Pertanian

Tambang pasir di Desa Malulu juga mengancam keberadaan irigasi yang sangat vital untuk pertanian masyarakat:

- a. Irigasi digunakan untuk mengairi sawah warga.
- b. Jika rusak atau terganggu, maka produktivitas pertanian akan menurun, dan masyarakat akan kehilangan sumber penghidupan utama.

Dengan berbagai alasan tersebut mulai dari gangguan terhadap aktivitas harian, kerusakan infrastruktur, ancaman keselamatan, hingga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Kecamatan Dondo secara tegas menolak eksploitasi tambang di wilayah mereka, terutama di Desa Malulu, demi menjaga kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh CV. Rajawali di Desa Malulu, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dapat disimpulkan bahwa aktivitas tersebut telah menimbulkan berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat. Perlawanan ini lahir akibat ketidakterbukaan pemerintah daerah dalam proses pemberian izin tambang, serta dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Masyarakat menolak aktivitas pertambangan tersebut karena beberapa alasan utama, antara lain:

1. Tidak adanya legalitas formal berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah bagi perusahaan tambang di Desa Malulu sebagaimana dinyatakan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan, termasuk pencemaran sungai sebagai satu-satunya sumber air bersih dan rusaknya saluran irigasi yang berdampak langsung pada lahan pertanian masyarakat.
3. Dampak sosial dan ekonomi, seperti matinya sumber penghidupan utama petani, rusaknya infrastruktur jalan, polusi udara dan suara, hingga potensi konflik horizontal antara masyarakat pro dan kontra tambang.

4. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.

Bentuk perlawanan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perlawanan tidak terorganisir (*hidden transcript*) seperti dijelaskan oleh James C. Scott. Bentuknya meliputi penolakan simbolik, aksi individu, penyebaran informasi oleh aktivis mahasiswa, hingga boikot kegiatan resmi pemerintah yang berkaitan dengan tambang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, perlawanan ini mengalami proses kolektivisasi dengan munculnya solidaritas antar warga dan keterlibatan elemen mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, diketahui bahwa aktivitas tambang masih berlangsung hingga tahun 2025, meskipun belum mengantongi izin resmi. Hal ini memperkuat asumsi bahwa ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya pengawasan pemerintah menjadi pemicu utama konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang di Desa Malulu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gerakan perlawanan masyarakat terhadap tambang di Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli merupakan wujud dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang abai terhadap prinsip partisipatif dan keberlanjutan lingkungan. Perlawanan ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bentuk kesadaran gerakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak ekologis dan ekonomis mereka.

Masyarakat menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan yang tidak terorganisir, seperti penolakan terhadap sosialisasi tambang, pembangkangan simbolik, serta diskusi dan edukasi oleh aktivis mahasiswa. Ketidakterbukaan pemerintah daerah dalam proses perizinan dan minimnya pelibatan masyarakat turut memperkuat ketidakpercayaan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat bukanlah semata-mata reaksi emosional, tetapi lahir dari kesadaran kolektif atas ancaman terhadap hak hidup dan lingkungan mereka.

B. Saran

Sebagai hasil dari karya tulis ilmiah ini ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan terhadap aparat pemerintah adalah

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, diharapkan untuk lebih transparan dalam proses pemberian izin tambang dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Evaluasi terhadap izin-izin pertambangan ilegal harus segera dilakukan untuk mencegah konflik berkepanjangan.
2. Kepada Masyarakat Desa Malulu, masyarakat perlu terus memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesadaran hukum serta lingkungan untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif dan damai, termasuk menggalang advokasi melalui jalur hukum dan kerja sama dengan lembaga pemerhati lingkungan.
3. Kepada Mahasiswa dan Aktivis, peran mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam membangun kesadaran publik.

Oleh karena itu, kegiatan edukasi, advokasi, serta kajian akademik perlu terus dilanjutkan untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil dalam mengawal isu-isu lingkungan dan pertambangan.

4. Kepada CV. Rajawali, sebagai pelaku usaha, perusahaan seharusnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Jika tetap ingin beroperasi, maka seluruh prosedur legal, termasuk dokumen perizinan dan AMDAL, harus dipenuhi terlebih dahulu, serta melibatkan masyarakat sekitar dalam rencana kerja secara terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- ADIL, A. A. (2017). *Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa*.
- Agus Winasis. 2016. *Jurnal : Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan SDA*. Universitas Tunggaladewi.
- Ahmad, S. (2022). *Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Industri Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Akram, H. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Alhakim, B. A. (2023). Selayang Pandang Gerakan Politik & Perubahan Sosial (Kajian Sosiologis Perilaku Makna). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(4), 1191-1204.
- Allen. D.E. 1980. *Social Psychology as Social Process*. Wadworth Inc : California
- AMAR, A. (2008). *Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Andi Haris, Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad. 2019. *Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Hasanudin *Journal Of Sociology*. Makassar
- Arabella, Sophia, Dzarna Dzarna, and Dina Merdeka Citraningrum. "Representasi Perlawanan Tokoh Mahasiswa Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S.

- Chudori." *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 12.1 (2024): 180-195.
- AZLLA, E. Z. (2018). *Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Basir. 2004. *Perilaku Demonstran Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua*. Yogyakarta : Pasca Sarjana UGM.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Tolitoli (2022)*. Diaksesn (<https://tolitolikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tolitoli.html>) 2 Agustus 2025
- Brannen. 2004. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Off Set
- Cohe. J Bruce. 1983. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Damayanti, A., Salsabila, A. P., & Pramasha, R. R. (2023). Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2), 195-210.
- Dr. Sirojuddin Aly,MA and Dr. Haniah Hanafie, M.si. *Gerakan Politik Islam Indonesia*. Universitas Islam Negeri Jakarta 2018.
- Dwidyawati, A. (2022). *IMPLEMENTASI FAKTOR-FAKTOR KEBIJAKAN, ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DAN KEPATUHAN BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Eka Zuni Lusi Astuti, 2012. *Pro Dan Kontra Rencana Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Gajah Mada
- Faried Ali dan Andi Syamsu Alam (2012;115), mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*).

- Gocha Narcky Ranggawale. 2023. *Settlement of law Enforcement Dilemma Mining Without License*. Universitas Sang Bumi Ruwa Lampung, Halaman 25
- Herman Hidayat. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm 9
- Herman Hidayat. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm 9
- Hesti Endrawati, 2023. *Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C* (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). *Restorica*, 9(1), 37–43.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.
- Ical, M. (2023). *Analisis Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Martadinata Indah Di Kecamatan Sindue Tobata* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara*. Justika Siar Publika.
- Irene Katharin Tilis, Fidelis A, et all, *Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengan Utara*, Universitas Timor.
- Irwansyah. *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*. Universitas Indonesia, 2020. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 1 No. 1. (<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253>)
- JATAM – WALHI JATIM. *Carut Marut Pengelolaan Pesisir Selatan Lumajang. SelamatkanBumi*. Diakses (<http://selamatkanbumi.com/id/carut-marut-pengelolaan-pesisir-selatan-lumajang/>) 3 Agustus 2025
- Jeanne Darc Novianti Manik. *Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia*. Universitas Bangka Belitung. 2013.
- Jian E: *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 5 Nomor 3 Edisi 2023
- Kabupaten Tolitoli Dalam Angka. *Tolitoli Regency In Figures*. 2024. Diakses (<https://api.tolitolikab.go.id/storage/unduhans/UP2hYEICmeUYzUzAzDTXkHKHCw98ypIQGhTuh221.pdf>) 3 Agustus 2025

- Khusniah, K. W. (2024). Gerakan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 447-455.
- LABAKA, T. Y., RARES, J., & KIYAI, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Buho-Boho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(112).
- M. T. Toha, 2019. *Simulasi BERM Terhadap Kestabilan Lereng Final Tambang Batubara Metode PSEUDO-STATIK*. *Jurnal Pertambangan*, 3(4)
- Manik, J. D. N. (2013). Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. *Promine*, 1(1).
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa." *Publiciana* 11.1 (2018): 72-88.
- Moh. Taufik, 2018. *Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah*. (<https://jatamsulteng.org/aktivitas-pertambangan-cv-rajawali-di-desa-malulu-kecamatan-dondo-kabupaten-tolitoli-tidak-memiliki-izin/>)
- Moh. Taufik. *Aktivitas Tambang Ilegal Desa Malulu Kecamatan Dondo*. *Jatam Sulteng*, 2018. (<https://jatamsulteng.org/aktivitas-tambang-ilegal-desa-malulu-kecamatan-dondo-kembali-beroperasi-aparat-penegak-hukum-harusnya-tidak-tutup-mata/>)
- Nuridin, N. (2021). Tradisi perlawanan kultural masyarakat samin. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 71-86.
- Ompusunggu, V. M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(2).
- Patmah, N. (2021). Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang).
- Pertambangan BPS. 2013. *Pertambangan*. Diakses (bps.go.id/id/Subjek/view/id/10) 3 Agustus 2015
- Puryanto, S., & Suyahmo, S. (2019). Strategi Gerakan Perlawanan Sosial Masyarakat Rembang dalam Menolak Korporasi Pabrik Semen. *Dialogia*, 17(2), 181-200.

- Portal Resmi Kabupaten Tolitoli. 2023. (Tolitolikab.go.id). Diakses pada tanggal 2 Agustus 2025 (<https://www.tolitolikab.go.id/p/sejarah>)
- Profil Kabupaten Tolitoli. BPK Perwakilan Sulawesi Tengah. Diakses (<https://sulteng.bpk.go.id/profil-kabupaten-tolitoli/>) 2 Agustus 2025
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506.
- Ridwan L, 2017. *Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riskiyanto Bahrul Ulum, 2022. *Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Hegemoni Negara (Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang Quarrrt Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kecamatan Purworejo)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyono, S.(2022). *Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas*. Universitas 17 Agustus. Semarang
- Rochimasnaini, A. (2016). *Negara dan kebijakan publik (studi peran negara terhadap kebijakan investasi pembangunan infrastruktur kereta cepat dalam perspektif ekonomi politik)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Setiyo Utomo, S. H., & Kn, M. Penguatan Pasal 33 Ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Majelis*, 51.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.

- Sinaga, D. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif).
- Soekanto Soerdjono. 2009, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Strategi, dan Dampak Gerakan. Yogyakarta: Insist Press.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susilowati, Enik Zuni, and Titik Indarti. "Resistensi perempuan dalam kumpulan cerita tandak karya royyan julian (Teori resistensi-James C. Scott)." *Surabaya: Universitas Negeri Surabaya* (2018).
- Sulaiman, U. (2023). Aneka Jenis Penelitian. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-46.
- Syaribulan, S., & Akhir, M. (2015). Gerakan sosial masyarakat peduli lingkungan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2).
- Syifa Izdihar Firdaus Asfianur, et all, 2020, *Gerakan Sosial “Sangsanga Melawan” (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan Dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sangsanga Dalam Sangsanga Kabupaten Kutai Kertanegara)*, Journal Pemerintahan Intergratif. Diakses pada 20 Mei 2025([https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2021/02/pin_syifa_gerakan.pdf%20\(02-17-21-08-54-56\).pdf](https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2021/02/pin_syifa_gerakan.pdf%20(02-17-21-08-54-56).pdf))
- Tamara Sujarwo Putri. *Tinjauan Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12000-12007 (<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>)
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar metode penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tohirin, *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan bimbingan dan konseling*, Jakarta:PT Raja Grafindo, Persada, 2013.

- Triana, S., & Antaryama, I. G. N. (2016). Konsep Defamiliarisasi pada Desain Museum Tambang Pasir Sungai Brantas. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2).
- Weber Max 2006 *Etika Protestan & Spirit Kapitalism: sejarah kemunculan dan ramalan tentang perkembangan kultur industrial kontemporer secara menyeluruh*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yosef Keladu. *Pertisipasi Politi: Sebuah Analisa Atas Etika Politik Aristoteles*. 2010 (repository.iftkledalero.ac.id)
- Yulisa Fringka, 2016. *Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi*, Universitas Indonesia. Diakses pada 20 Mei 2025 (<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=mjs>)
- Zubir, Zaiyardam. 2002. *Radikalime Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu,*

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية باله
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 73 Palu Telp. 0451 4607901 Fax. 0451 460165
Website: www.undatokarama.ac.id email: humas@undatokarama.ac.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: ALDIANSYAH	NIM	: 212170019
TTL	: Ogowele 24-10-2001	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jurusan	: Pemikiran Politik Islam (PPI)	Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl puebongo	No. HP	: 085394941354
Judul			

☒ Judul I

Analisis gerakan politik masyarakat dalam penolakan eksploitasi tambang di kecamatan dondo kabupaten toli-toli

☐ Judul II

Partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri (studi desa ogowele kabupaten toli-toli)

☐ Judul III

Dibalik aksi demonstrasi mahasiswa pengaruh media sosial terhadap perilaku politik

Palu, 19 Februari 2025

Mengetahui,
Dosen Penasehat Akademik

Mahasiswa

Mohammad syafri, s.pd., M.pd
NIP. 199308032019031004

ALDIANSYAH
NIM.212170019

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : MDORWATUD SEJON, M.A

Pembimbing II : SUMARDI, M.PA.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

a.n. Ketua Jurusan/ Koord. Prodi,
sektor PPI

Dr. Suraya Attamimi, S.Ag., M.Th.I
NIP. 197502222007102003

Muhammad laufik, m.sos
NIP. 198604222019031002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 129 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menunjuk Saudara :

1. Noorwahid Sofjan, S.Ip., M.A
2. Sunardi, S.IP., M.PA.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : Aldiansyah
NIM : 212170019
Jurusan : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (PPI)
Semester : VIII
Tempat/Tgl lahir : Ogowale, 24 Oktober 2001
Judul Skripsi : ANALISIS GERAKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM PENOLAKKAN EKSPLOITASI TAMBANG DI KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLI-TOLI

KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :

1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi

KETIGA : Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPFA Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas

Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Februari 2025

Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Datokarama Palu;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 545 /Un.24/F.III/PP.00.9/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi
Hal : Undangan Seminar

Palu, 5 Juni 2025

Kepada Yth:

1. Ketua/Sekretaris Program Pemikiran Politik Islam (PPI)
2. Para Pembimbing Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian. Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 19640616 199703 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah 1: "Kenapa masyarakat Dondo menolak eksploitasi tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli?"

1. Apa yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui tentang aktivitas tambang di wilayah ini?
 2. Sejak kapan aktivitas tambang mulai beroperasi di Kecamatan Dondo?
 3. Apakah masyarakat mengetahui bahwa tambang tersebut legal atau ilegal? Dari mana informasi tersebut diperoleh?
 4. Apa saja dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sejak adanya aktivitas tambang?
 5. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas tambang terhadap masyarakat sekitar?
 6. Apakah pemerintah daerah atau pihak perusahaan pernah melakukan sosialisasi atau konsultasi sebelum tambang beroperasi?
 7. Apa alasan utama masyarakat menolak keberadaan tambang tersebut?
- Apakah terdapat nilai-nilai adat atau kearifan lokal yang dilanggar oleh aktivitas tambang?
8. Apakah masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan?

Rumusan Masalah 2: "Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap perusahaan tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli?"

1. Bagaimana masyarakat pertama kali merespons kehadiran tambang di wilayah ini?
2. Apakah masyarakat pernah melakukan aksi protes atau unjuk rasa? Jika ya, seperti apa bentuknya?
3. Siapa saja yang terlibat dalam gerakan perlawanan (tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, lembaga adat, dsb.)?
4. Apakah masyarakat menggunakan jalur hukum atau administratif untuk menolak aktivitas tambang? Bagaimana prosesnya?
5. Apakah ada dukungan dari LSM, media, atau organisasi eksternal dalam gerakan penolakan ini?

6. Bagaimana peran pemerintah desa atau kecamatan dalam menyikapi perlawanan masyarakat
7. Apakah gerakan perlawanan ini pernah mendapat tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu ?
8. Apa hasil atau dampak yang sudah dicapai dari perlawanan masyarakat sejauh ini?
9. Bagaimana masyarakat menjaga semangat kolektif dalam mempertahankan wilayahnya dari eksploitasi tambang?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan
1	BAPAK SIMON	KA SARPRAS
2	BAPAK JUSMAN	KEPALA DESA OGOELE KEC. DONDO
3	BAPAK ADNAN	KEPALA DESA MALULU KEC. DONDO
4	MOHAMMAD SYAHRUL	KARYAWAN CV. RAJAWALI
5	MOH. TAUFAN	AKTIVIS MAHASISWA
6	SITTI AMNINAH	SALAH SATU MASYARAKAT DESA YANG BERTEMPAT TINGGAL DI SEKITAR DAERAH DEKAT PERTAMBANGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 153/Un.24/F.III/PP.00.9/07/2025
Lampiran :
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 27 Juli 2025

Kepada Yth.
Camat Dondo

Di
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : ALDIANSYAH
NIM : 212170019
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)
Alamat : Jl. Touwa
No. Hp : 085394941354

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT MENOLAK TAMBANG ILEGAL DI KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLI-TOLI**".

Dosen Pembimbing :
1. Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A.
2. Sunardi, M.PA.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli. Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

Tembusan :
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi : wawancara kepada Bapak Simon (KA SARPRAS Kec. Dondo)



Dokumentasi : Wawancara Bapak Jusman (Kepala Desa Ogoweke kec. Dondo)



Dokumentasi : Bapak Adnan (Kepala Desa Malulu Kec. Dondo)



Dokumentasi : Bapak Syahrul (Karyawan pertambangan CV. Rajawali)



Dokumentasi : Wawancara beberapa masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pertambangan



Dokumentasi : Keadaan daerah pertambangan